

Katalog : 3205005.18

PROFIL KEMISKINAN MAKRO PROVINSI LAMPUNG

2018

<https://lampung.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI LAMPUNG**

PROFIL KEMISKINAN MAKRO PROVINSI LAMPUNG 2018

<https://lampung.bps.go.id>



PROFIL KEMISKINAN MAKRO PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018

ISBN: 978-602-7746-36-7

No. Publikasi: 18520.1901

Katalog: 3205005.18

Ukuran Buku: 21,0 x 29,7 cm

Jumlah Halaman: x + 47 halaman

Naskah:

Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi Lampung

Penyunting:

Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi Lampung

Disain Kover oleh:

Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi Lampung

Penerbit:

© BPS Provinsi Lampung

Pencetak:

CV. Jaya Wijaya

Sumber Ilustrasi : -

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

KATA PENGANTAR

Publikasi Profil Kemiskinan Makro Provinsi Lampung Tahun 2018 merupakan publikasi yang diterbitkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umum pengguna data. Publikasi ini menyajikan metodologi, penghitungan dan analisis deskriptif terkait tingkat kemiskinan dan ketimpangan di Provinsi Lampung tahun 2018. Sejalan dengan itu, penerbitan publikasi ini akan sangat bermanfaat untuk melihat perkembangan kondisi kemiskinan terkini beserta program-program pengentasannya yang ada di Provinsi Lampung

Data yang disajikan pada publikasi ini merupakan data seri yang berasal dari pendataan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2018 baik dari Susenas Kor maupun Susenas Modul Konsumsi dan Pengeluaran. Selain itu, beberapa data yang disajikan juga diambil dari Berita Resmi Statistik yang rutin dirilis dan dipublikasikan kepada rekan media.

Akhir kata, kami berharap agar publikasi ini dapat bermanfaat khususnya bagi para pengambil keputusan sebagai acuan atau rujukan dalam rangka penyusunan arah dan kebijakan pembangunan terutama dalam hal pengentasan kemiskinan. Kami menyadari bahwa publikasi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu berbagai masukan, kritik, dan saran sangat diperlukan untuk perbaikan publikasi di masa mendatang.

Bandar Lampung, April 2019
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Lampung



Yeane Irmaningrum S., MA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan Penulisan	2
1.3. Ruang Lingkup dan Data yang Digunakan	2
1.4. Sistematika Penulisan	2
BAB II METODOLOGI	5
2.1. Metode Penghitungan	5
2.1.1 Garis Kemiskinan	5
2.1.2 Indikator Kemiskinan P_0 , P_1 dan P_2	7
2.2. Konsep dan Definisi	8
BAB III KONDISI KEMISKINAN PROVINSI LAMPUNG	11
3.1. Garis Kemiskinan	11
3.2. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin	18
3.3. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1)	24
3.4. Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2)	26
BAB IV KETIMPANGAN PENGELUARAN PROVINSI LAMPUNG	29
4.1. <i>Gini Ratio</i>	29
4.2. Indeks Theil	30
4.3 Indeks L	31
4.4 Kriteria Bank Dunia	31

BAB V PROFIL RUMAH TANGGA MISKIN PROVINSI LAMPUNG	33
5.1. Karakteristik Sosial Demografi	33
5.2. Karakteristik Pendidikan	34
5.3. Karakteristik Ketenagakerjaan	35
5.4. Karakteristik Tempat Tinggal (Perumahan)	38
5.4.1. Luas Lantai	38
5.4.2. Jenis Lantai	39
5.4.3. Jenis Atap	40
5.4.4. Jenis Dinding	41
5.4.5. Jenis Jamban	41
BAB VI PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN	43
6.1. Simpanan Keluarga Sejahtera	43
6.2. Program Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin)/Beras Sejahtera (Rastra)	44
6.3. Program Indonesia Pintar	45
6.4. Kredit Usaha Rakyat (KUR)	45
DAFTAR PUSTAKA	47

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Garis Kemiskinan Menurut Tipe Daerah di Provinsi Lampung, 2014 - 2018	13
Tabel 3.2	Daftar Komoditas yang Memberi Pengaruh Besar pada Kenaikan Garis Kemiskinan di Perkotaan Provinsi Lampung, 2014 - 2018	14
Tabel 3.3	Daftar Komoditas yang Memberi Pengaruh Besar pada Kenaikan Garis Kemiskinan di Perdesaan Provinsi Lampung, 2014 - 2018	16
Tabel 3.4	Jumlah Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2015 – 2018 (000 jiwa)	22
Tabel 3.5	Persentase Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2015 – 2018	23
Tabel 3.6	Indeks Kedalaman Kemiskinan menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2015 - 2018	25
Tabel 3.7	Indeks Keparahan Kemiskinan menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2015 - 2018	27
Tabel 5.1	Karakteristik Sosial Demografi Rumah Tangga Miskin dan Rumah Tangga Tidak Miskin menurut Daerah di Provinsi Lampung, 2018	33
Tabel 5.2	Persentase Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin menurut Kemampuan Membaca dan Menulis Kepala Rumah Tangga dan Daerah di Provinsi Lampung,	34
Tabel 5.3	Persentase Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin menurut Pendidikan Kepala Rumah Tangga dan Daerah di Provinsi Lampung, 2018	35
Tabel 6.1	Persentase Rumah Tangga Penerima Beras Miskin (Raskin)/Beras Sejahtera (Rastra) Periode November 2017 Sampai dengan Februari 2018 menurut Desil Pengeluaran dan Daerah di Provinsi Lampung	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Garis Kemiskinan Perkotaan, Perdesaan dan Kota dan Desa di Provinsi Lampung, Tahun 2014 – 2018 (Rupiah perkapita perbulan)	11
Gambar 3.2	Garis Kemiskinan menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2015 – 2018 (Rupiah/Kapita/Bulan)	17
Gambar 3.3	Jumlah Penduduk Miskin (000) jiwa dan Persentase Penduduk Miskin (P_0) di Provinsi Lampung, 2014 - 2018	18
Gambar 3.4	Jumlah Penduduk Miskin (000) jiwa menurut Daerah Tempat Tinggal di Provinsi Lampung, 2014 - 2018	19
Gambar 3.5	Perkembangan Persentase Penduduk Miskin menurut Daerah Tempat Tinggal di Provinsi Lampung, 2014 - 2018	20
Gambar 3.6	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) Provinsi Lampung menurut Daerah, Maret 2017 – Maret 2018	26
Gambar 3.7	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_2) Provinsi Lampung menurut Daerah, Maret 2017 – Maret 2018	27
Gambar 4.1	<i>Gini Ratio</i> Provinsi Lampung menurut Daerah, Maret 2017 – Maret 2018	29
Gambar 4.2	<i>Gini Ratio</i> Provinsi Lampung menurut Daerah, 2015 - 2018	30
Gambar 4.3	Indeks Theil Provinsi Lampung menurut Daerah, Maret 2017 – Maret 2018	30
Gambar 4.4	Indeks-L Provinsi Lampung menurut Daerah, Maret 2017 – Maret 2018	31
Gambar 4.5	Distribusi Pengeluaran Penduduk 40 Persen Terendah menurut Daerah dan Kriteria Bank Dunia, Maret 2017 – Maret 2018	32
Gambar 5.1	Persentase Rumah Tangga Miskin menurut Lapangan Usaha Kepala Rumah Tangga di Provinsi Lampung, Tahun 2018	36
Gambar 5.2	Persentase Rumah Tangga Miskin menurut Status Pekerjaan Utama Kepala Rumah Tangga di Provinsi Lampung, Tahun 2018	38

Gambar 5.3	Persentase Rumah Tangga Miskin menurut Luas Lantai Per Kapita di Provinsi Lampung, Tahun 2018	39
Gambar 5.4	Persentase Rumah Tangga Miskin menurut Jenis Lantai Terluas di Provinsi Lampung, Tahun 2018	40
Gambar 5.5	Persentase Rumah Tangga Miskin menurut Jenis Atap Terluas di Provinsi Lampung, Tahun 2018	40
Gambar 5.6	Persentase Rumah Tangga Miskin menurut Jenis Dinding Terluas di Provinsi Lampung, Tahun 2018	41
Gambar 5.7	Persentase Rumah Tangga Miskin menurut Jenis Jamban yang Digunakan di Provinsi Lampung, Tahun 2018	42
Gambar 6.1	Persentase Rumah Tangga yang Menerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/ Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) menurut Quintil Pengeluaran Perkapita/Bulan di Provinsi Lampung, 2018	43
Gambar 6.2	Persentase Rumah Tangga yang Menerima Program Indonesia Pintar (PIP) menurut Quintil Pengeluaran Perkapita/Bulan di Provinsi Lampung, 2018	45
Gambar 6.3	Persentase Rumah Tangga yang Menerima KUR menurut Quintil Pengeluaran Perkapita/Bulan di Provinsi Lampung, 2018	46

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masalah kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan bersifat multidimensional karena sangat erat kaitannya dengan berbagai aspek kehidupan baik sosial, ekonomi, budaya, dan aspek lainnya. Kemiskinan menjadi prioritas pembangunan untuk ditangani. Upaya pengentasan kemiskinan sudah dilakukan sejak masa awal kemerdekaan dengan berbagai macam strategi penanggulangan kemiskinan. Program-program pembangunan yang dilaksanakan selama ini juga selalu memberikan perhatian besar terhadap upaya pengentasan kemiskinan karena pada dasarnya pembangunan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kemiskinan merupakan indikator makro yang dapat memberikan informasi terkait seberapa banyak penduduk suatu wilayah yang belum sejahtera. Selain itu pula, kemiskinan dapat dipergunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan yang telah dilakukannya. Kompleksitas kemiskinan tidak hanya terkait dengan upaya pengentasan penduduk miskin namun juga mencakup implementasi pembangunan dan efektivitas program di bidang ekonomi dan sosial.

Penanggulangan kemiskinan secara sinergis dan sistematis harus dilakukan agar seluruh warga negara mampu menikmati kehidupan yang layak dan bermartabat. Sejalan dengan hal tersebut, maka pada era Kabinet Kerja, pemerintah masih menetapkan penanggulangan kemiskinan sebagai salah satu prioritas utama pembangunan.

Salah satu aspek penting untuk mendukung Strategi Penanggulangan Kemiskinan tersebut tentunya memerlukan dukungan data maupun informasi yang akurat dan terpercaya. Ketersediaan data kemiskinan dan informasi mengenai potensi sosial dan ekonomi terutama di Provinsi Lampung sangat diperlukan sebagai pijakan penting bagi penyusunan strategi, prioritas dan program pembangunan di kawasan ini. Apalagi persentase kemiskinan Provinsi Lampung juga masih relatif tinggi.

1.2 Tujuan Penulisan

Publikasi ini dimaksudkan sebagai sumber informasi yang komprehensif terkait dengan kemiskinan di Provinsi Lampung. Selain itu, publikasi ini bertujuan untuk:

1. Memberikan informasi kemiskinan di Provinsi Lampung hingga kabupaten/kota
2. Menyajikan informasi mengenai karakteristik rumah tangga miskin di Lampung
3. Menyajikan informasi terkait dengan potensi yang tersedia di Provinsi Lampung

1.3 Ruang Lingkup dan Data yang Digunakan

Publikasi ini menyajikan data terkait dengan garis kemiskinan dan indikator kemiskinan untuk kabupaten/kota di Provinsi Lampung tahun 2014 – 2018. Selain itu disajikan juga data mengenai karakteristik rumah tangga miskin di Provinsi Lampung menurut variabel tingkat pendidikan kepala rumah tangga (KRT) dari rumah tangga miskin, lapangan usaha KRT dari rumah tangga miskin, dan beberapa variabel yang terkait dengan fasilitas rumah tangga miskin tahun 2018. Publikasi ini juga menyajikan beberapa potensi dari desa yang berbatasan dengan laut di Provinsi Lampung. Data yang digunakan dalam publikasi ini adalah hasil pengolahan dari Susenas September 2014, Maret 2015 - 2018. Hal ini mengingat bahwa estimasi tingkat kemiskinan kabupaten/kota didapatkan pada periode tersebut. Selain itu, juga digunakan data dari hasil pendataan Potensi Desa (PODES) tahun 2018.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun penyusunan publikasi ini terdiri dari:

1. Bab I yang berisi penjelasan terkait latar belakang, tujuan penulisan, ruang lingkup dan data yang digunakan serta sistematika penulisan
2. Bab II yang berisi penjelasan mengenai metodologi penghitungan garis kemiskinan, indikator kemiskinan P_0 , P_1 dan P_2 , serta beberapa konsep dan definisi.
3. Bab III yang berisi penjelasan mengenai garis kemiskinan, jumlah dan persentase kemiskinan, indeks kedalaman kemiskinan, indeks keparahan kemiskinan dan beberapa karakteristik rumah tangga miskin di Provinsi Lampung.
4. Bab IV yang berisi penjelasan mengenai kemiskinan di Provinsi Lampung, kemiskinan di desa yang berbatasan dengan laut.

5. Bab V yang merupakan penutup dimana dibahas dan disajikan secara singkat butir-butir penting terkait dengan kemiskinan di Provinsi Lampung.

<https://lampung.bps.go.id>

BAB II

METODOLOGI

2.1 Metode Penghitungan

Salah satu definisi kemiskinan difokuskan pada ketidakmampuan seseorang untuk mendapatkan sejumlah komoditi makanan dan kebutuhan dasar lainnya (UNSD, 2005). Meskipun dianggap menyempitkan makna dari kemiskinan itu sendiri, namun mengingat sisi kepraktisannya maka ukuran inilah yang hingga saat ini masih banyak digunakan. Selain itu, beberapa konsep kemiskinan lainnya sukar untuk diukur dan pada dasarnya masih sangat terkait dengan kemampuan keuangan dari seseorang.

Di Indonesia, konsep mengenai kemiskinan tersebut diadopsi dengan menggunakan pendekatan kebutuhan dasar (*basic need approach*). Besaran nilai kebutuhan dasar minimum tersebut ditentukan dengan menggunakan Garis Kemiskinan (GK), yaitu batas minimum pengeluaran per kapita per bulan untuk memenuhi makanan dan bukan makanan. Adapun besaran GK yang selama ini digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) terdiri dari dua komponen, yaitu garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan bukan makanan (GKNM).

2.1.1 Garis Kemiskinan

Pada penghitungan garis kemiskinan provinsi dilakukan dengan menggunakan pendekatan kebutuhan dasar. Komoditi kebutuhan dasar dipilih dari sejumlah komoditi yang paling banyak dikonsumsi oleh kelompok referensi (BPS, 2002). Untuk mendapatkan GK di tingkat provinsi, BPS terlebih dahulu menentukan kelompok referensi sebanyak 20 persen dari penduduk dengan nilai konsumsi yang berada diatas garis kemiskinan sementara (GKS). GKS adalah GK pada periode sebelumnya yang telah dikalikan dengan faktor inflasi. Dari kelompok acuan tersebut kemudian dilakukan penghitungan nilai konsumsi terhadap 52 komoditas makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari. Penyetaraan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan dilakukan dengan menghitung rata-rata kalori dari ke-52 komoditas tersebut. Dari hasil perhitungan tersebut diperoleh GKM. Selanjutnya GKM tersebut disetarakan dengan 2.100 kilokalori

dengan mengalikan 2.100 terhadap harga implisit rata-rata kalori menurut daerah dari penduduk referensi.

Adapun GKNM merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditas non makanan terpilih yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Nilai kebutuhan minimum per komoditi atau sub kelompok non makanan dihitung dengan menggunakan suatu rasio pengeluaran komoditi atau sub kelompok tersebut terhadap total pengeluaran komoditi atau sub kelompok yang tercatat dalam data Susenas modul konsumsi.

Selanjutnya, penjumlahan dari GKM dan GKNM menghasilkan GK. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah GK dikategorikan sebagai penduduk miskin. Adapun penghitungan GK untuk masing-masing kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

a. Garis Kemiskinan Sementara (GKS) untuk tingkat Kabupaten/Kota dihitung dengan rumus:

$$GKS_{ij}^t = GKS_{ij}^{t-1} \times (1 + E_j \times I_{ij})$$

Dimana:

GKS_{ij}^t : Garis kemiskinan sementara kabupaten/kota ke- i di provinsi ke- j di tahun t

GKS_{ij}^{t-1} : Garis kemiskinan kabupaten/kota ke- i di provinsi ke- j di tahun $t-1$

E_j : Elastisitas provinsi ke- j (rasio antara pertumbuhan garis kemiskinan provinsi ke- j terhadap inflasi provinsi ke- j)

I_{ij} : Inflasi kabupaten/kota ke- i di provinsi ke- j

Catatan:

- Untuk mencari GKS pada tingkat Kabupaten ke- i digunakan elastisitas provinsi ke- j di level pedesaan.
- Untuk mencari GKS pada tingkat Kota ke- i digunakan elastisitas provinsi ke- j di level perkotaan.
- Untuk kabupaten/kota yang bukan kota inflasi, laju inflasinya diperoleh dari kabupaten/kota yang berdekatan (pendekatan *sister city*).

b. Menentukan P_0 sementara kabupaten/kota ke- i di provinsi ke- j yaitu dengan cara mengalikan pertumbuhan P_0 provinsi ke- j periode t ke $t-1$ dengan P_0 kabupaten ke- i pada tahun $t-1$

- c. Menetapkan garis kemiskinan dengan cara mencari titik potong antara GKS dan P_0 sementara.
- d. Menghitung indikator kemiskinan dengan menggunakan formulasi *Foster Greer Thorbecke* (FGT).
- e. Melakukan *prorate* jumlah penduduk miskin kabupaten/kota agar sama dengan angka provinsi yang telah dirilis sebelumnya.

2.1.2 Indikator Kemiskinan P_0 , P_1 dan P_2

Indikator yang biasa digunakan terkait dengan kemiskinan antara lain adalah persentase penduduk miskin (P_0), indeks kedalaman kemiskinan (P_1) dan indeks keparahan kemiskinan (P_2). Persentase penduduk miskin memberikan informasi mengenai proporsi penduduk yang termasuk dalam kategori miskin, yaitu perbandingan antara penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan terhadap total penduduk di wilayah tersebut.

Adapun indeks kedalaman kemiskinan (P_1) adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Sementara itu, indeks keparahan kemiskinan (P_2) adalah Indeks yang memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin.

Ketiga ukuran kemiskinan tersebut diperoleh melalui penghitungan dengan menggunakan formulasi FGT. Adapun formula FGT adalah:

$$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left(\frac{Z - y_i}{Z} \right)^{\alpha}$$

Dimana

α = 0, 1, 2

Z = Garis kemiskinan

y_i = Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ($i = 1, 2, 3, \dots, q$),

q = Banyaknya penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan

n = Jumlah penduduk

Jika $\alpha = 0$ maka diperoleh *Head Count Index* (P_0)

Jika $\alpha = 1$ diperoleh Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index* P_1)

Jika $\alpha = 2$ diperoleh Indeks Keparahhan Kemiskinan (*Poverty Severity Index* P_2)

2.2 Konsep dan Definisi

- a. Pendidikan yang ditamatkan adalah ijazah atau STTB tertinggi yang dimiliki kepala rumah tangga berumur 15 tahun keatas. Publikasi ini mengelompokkan ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki menjadi tiga, yaitu tidak mempunyai ijazah, mempunyai ijazah SD atau SLTP dan mempunyai ijazah minimal SLTA khusus untuk kepala rumah tangga miskin.
- b. Bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama 1 jam secara terus-menerus dalam seminggu yang lalu. Penduduk yang dicatat untuk publikasi ini khusus penduduk miskin berumur 15 tahun keatas.
- c. Bekerja di sektor pertanian adalah kepala rumah tangga miskin berumur 15 tahun keatas yang bekerja di sektor pertanian tanaman padi dan palawija, hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan dan pertanian lainnya.
- d. Bekerja di sektor industri adalah kepala rumah tangga miskin berumur 15 tahun keatas yang bekerja di sektor industri.
- e. Bekerja di sektor lainnya adalah kepala rumah tangga miskin berumur 15 tahun keatas yang bekerja di luar sektor pertanian dan industri.
- f. Kategori "Tidak bekerja" dalam publikasi ini termasuk pengangguran dan penduduk bukan angkatan kerja.
- g. Rumah tangga pengguna air bersih adalah persentase rumah tangga yang menggunakan air minum yang berasal dari air kemasan bermerk, air isi ulang, air ledeng/PAM, sumur bor/pompa, sumur terlindung atau mata air terlindung (dengan jarak ke penampungan limbah/kotoran/tinja lebih dari atau sama dengan 10 meter).
- h. Rumah tangga pengguna jamban sendiri/bersama adalah persentase rumah tangga yang menggunakan fasilitas tempat pembuangan air besar yang digunakan oleh rumah tangga itu sendiri atau bersama dengan rumah tangga tertentu.
- i. Luas lantai per kapita adalah luas lantai yang ditempati dan digunakan untuk keperluan sehari-hari (sebatas atap) dibagi banyaknya anggota rumah tangga. Bagian-bagian yang digunakan bukan untuk keperluan sehari-hari tidak dimasukkan dalam perhitungan luas lantai seperti lumbung padi, kandang ternak, lantai jemur (hamparan semen) dan ruangan khusus untuk usaha (misalnya warung). Untuk bangunan bertingkat, luas lantai adalah jumlah luas dari semua tingkat yang ditempati. Kementerian Kesehatan

menyatakan bahwa sebuah rumah dikategorikan sebagai rumah sehat apabila luas lantai per kapita yang ditempati minimal sebesar 8 m². Sedangkan *World Health Organisation* (WHO) dan *American Public Health Association* (APHA) mensyaratkan luas lantai per kapita minimal 10 m². Kategori luas lantai per kapita yang digunakan dalam publikasi ini adalah kurang dari atau sama dengan 8 m², 9m² sampai 15 m², dan lebih dari 15 m².

- j. Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan salah satu indikator ekonomi penting yang dapat memberikan informasi mengenai perkembangan harga barang dan jasa yang dibayar oleh konsumen atau masyarakat, khususnya masyarakat perkotaan. IHK mengukur perubahan pengeluaran/biaya barang dan jasa (paket komoditi) yang biasa dibeli oleh mayoritas rumah tangga dari waktu ke waktu. Dengan kualitas dan kuantitas paket komoditas yang dianggap konstan pada tahun dasar, indeks tersebut semata-mata mencerminkan perubahan harga dan didesain sebagai suatu ukuran dari dampak perubahan harga pada pembelian barang dan jasa. Inflasi dihitung dengan menggunakan metode "*point to point*" yaitu dengan membandingkan IHK dari periode sebelumnya.
- k. Kuintil adalah nilai statistik dari kumpulan data yang mewakili 20% populasi tertentu, jadi kuintil pertama mewakili seperlima terendah dari data (1% hingga 20%), kuintil kedua mewakili seperlima yang kedua (21% hingga 40%) dan seterusnya.
- l. Desil adalah nilai statistik dari kumpulan data yang mewakili 10% populasi tertentu, jadi desil pertama mewakili sepersepuluh terendah dari data (1% hingga 10%), desil kedua mewakili sepersepuluh bagian yang kedua (11% hingga 20%) dan seterusnya.

BAB III

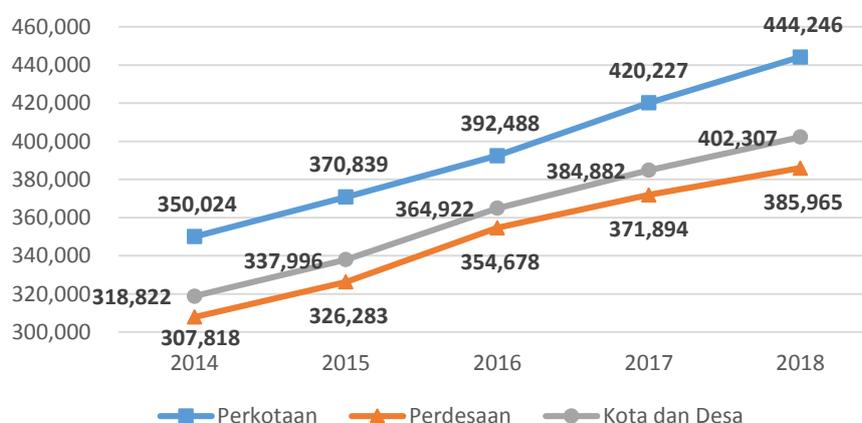
KONDISI KEMISKINAN PROVINSI LAMPUNG

3.1 Garis Kemiskinan

Garis kemiskinan adalah garis batas yang membedakan antara kelompok penduduk miskin dan tidak miskin. Garis ini menunjukkan sejumlah rupiah yang diperlukan oleh individu untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup minimumnya, baik kebutuhan makanan maupun non makanan (BPS, 2002). Penduduk dengan nilai pengeluaran dibawah garis kemiskinan akan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Sebaliknya penduduk dengan jumlah pengeluaran yang lebih besar dari nilai garis kemiskinan dikategorikan sebagai bukan penduduk miskin.

Garis kemiskinan biasanya dibuat lebih dari satu. Hal ini diperlukan untuk mengakomodir perbedaan karakteristik wilayah, terutama dalam kaitannya dengan harga komoditi dan pola konsumsi yang berbeda antar wilayah. Dalam hal ini, garis kemiskinan dibedakan menjadi garis kemiskinan daerah perkotaan dan garis kemiskinan daerah perdesaan. Selain itu, garis kemiskinan juga dibedakan menurut kabupaten/kota.

Gambar 3.1 Garis Kemiskinan Perkotaan, Perdesaan dan Kota dan Desa di Provinsi Lampung, Tahun 2014 – 2018 (Rupiah per Kapita perbulan)



Sumber: BPS Provinsi Lampung, Berita Resmi Statistik (Tema Kemiskinan) 2015 – 2018

Gambar 3.1 menunjukkan perkembangan garis kemiskinan untuk wilayah perkotaan, perdesaan dan gabungan antara wilayah perkotaan dan perdesaan di Provinsi Lampung tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Garis Kemiskinan di wilayah perkotaan pada tahun 2014, tercatat 350.024 rupiah per kapita per bulan. Angka tersebut menunjukkan bahwa seseorang di wilayah perkotaan akan dikategorikan sebagai penduduk miskin jika total pengeluaran untuk konsumsi makanan dan non makanan setiap bulannya kurang dari 350.024 rupiah. Garis kemiskinan wilayah perkotaan terus mengalami peningkatan untuk tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2018, garis kemiskinan di wilayah perkotaan sebesar 444.246 rupiah per kapita per bulan. Dalam kurun waktu 2014 – 2018, rata-rata peningkatan garis kemiskinan tercatat sebesar 6,14 persen. Peningkatan garis kemiskinan terbesar terjadi pada tahun 2017 dimana garis kemiskinan meningkat sebesar 7,07 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Untuk wilayah perdesaan, garis kemiskinan juga menunjukkan pola yang sama dengan wilayah perkotaan. Garis kemiskinan di perdesaan menunjukkan pola yang terus meningkat dari tahun ke tahun untuk periode 2014 – 2018. Secara rata-rata, garis kemiskinan di perdesaan meningkat sebesar 5,83 persen setiap tahunnya selama kurun waktu 2014 – 2018. Selama periode lima tahun terakhir, garis kemiskinan untuk wilayah perdesaan mengalami lonjakan peningkatan pada tahun 2016. Pada tahun tersebut, garis kemiskinan meningkat sebesar 8,70 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Secara umum, garis kemiskinan Provinsi Lampung menunjukan pola yang hampir sama dengan garis kemiskinan di perdesaan dan perkotaan. Pada tahun 2014, garis kemiskinan Lampung sebesar 318.822 rupiah per kapita per bulan. Pada tahun-tahun selanjutnya, garis kemiskinan menunjukan adanya peningkatan. Secara rata-rata laju peningkatan garis kemiskinan selama tahun 2014 – 2018 adalah sebesar 5,99 persen per tahun.

Tabel 3.1 berikut memberikan informasi mengenai garis kemiskinan daerah perdesaan dan perkotaan menurut komponen pembentuknya. Pada tahun 2014 – 2018, garis kemiskinan makanan baik di perkotaan maupun perdesaan memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan total garis kemiskinan. Di wilayah perkotaan, garis kemiskinan makanan memberikan sumbangan secara rata-rata sebesar 71,39 persen terhadap total garis kemiskinan selama kurun waktu lima tahun terakhir. Adapun garis

kemiskinan bukan makanan, secara rata-rata hanya memberikan sumbangan sebesar 28,61 persen pada kurun waktu yang sama. Selain itu, dalam kurun waktu 2014 – 2018, garis kemiskinan makanan di perkotaan menunjukkan kontribusi yang meningkat terhadap garis kemiskinan secara keseluruhan.

Tabel 3.1 Garis Kemiskinan Menurut Tipe Daerah di Provinsi Lampung, 2014 – 2018

Daerah / Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)		
	Makanan	Bukan Makanan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Perkotaan			
2014	248.489	101.535	350.024
2015	260.892	109.948	370.839
2016	279.240	113.248	392.488
2017	302.761	117.466	420.227
2018	321.620	122.626	444.246
Perdesaan			
2014	239.134	68.684	307.818
2015	251.365	74.918	326.283
2016	272.168	82.510	354.678
2017	285.183	86.711	371.894
2018	293.926	92.038	385.965
Kota + Desa			
2014	241.573	77.249	318.822
2015	253.869	84.127	337.996
2016	274.437	90.485	364.922
2017	289.706	95.176	384.882
2018	301.234	101.073	402.307

Sumber: BPS Provinsi Lampung, Berita Resmi Statistik (Tema Kemiskinan) 2015 – 2018

Tidak terlalu berbeda dengan garis kemiskinan di perkotaan, garis kemiskinan di daerah perdesaan juga didominasi pembentukannya oleh garis kemiskinan makanan. Pada tahun 2014, garis kemiskinan makanan tercatat 239.134 rupiah per kapita per bulan di perdesaan. Kondisi ini memberikan kontribusi sebesar 77,69 persen terhadap garis kemiskinan total. Pada saat yang sama, garis kemiskinan bukan makanan memberikan sumbangan sebesar 22,31 persen dari total garis kemiskinan di daerah perdesaan. Pada tahun 2018, garis kemiskinan makanan perdesaan tercatat sebesar 293.926 per kapita per bulan atau memberikan sumbangan sebesar 76,15 persen terhadap total garis kemiskinan.

Sementara itu, kontribusi garis kemiskinan bukan makanan adalah 23,85 persen. Situasi ini mencerminkan adanya penurunan kontribusi garis kemiskinan makanan terhadap pembentukan garis kemiskinan secara keseluruhan di daerah perdesaan.

Secara keseluruhan, selama rentang waktu 2014 – 2018, garis kemiskinan makanan masih mendominasi dalam pembentukan garis kemiskinan baik di perdesaan maupun di perkotaan di Lampung. Meskipun demikian, terlihat adanya pola yang sedikit berbeda antara garis kemiskinan makanan di perkotaan dan di perdesaan. Selama periode 2014 – 2018, kontribusi garis kemiskinan makanan terhadap garis kemiskinan total menunjukkan kecenderungan yang meningkat di daerah perkotaan. Sebaliknya, pada periode yang sama, garis kemiskinan makanan justru menunjukkan kontribusi yang semakin berkurang terhadap pembentukan garis kemiskinan total di daerah perdesaan.

Berdasarkan komoditas pembentuknya, garis kemiskinan makanan di daerah perkotaan dan perdesaan sangat didominasi oleh komoditas beras. Di daerah perkotaan, kontribusi terbesar komoditas beras terhadap garis kemiskinan makanan terjadi pada tahun 2016. Pada tahun tersebut, beras memberikan sumbangan sebesar 30,01 persen terhadap garis kemiskinan makanan.

Tabel 3.2 Daftar Komoditas yang Memberi Pengaruh Besar pada Kenaikan Garis Kemiskinan di Perkotaan Provinsi Lampung, 2014 - 2018

Jenis Komoditi	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<u>Makanan</u>					
Beras	17,14	18,71	30,01	25,45	28,84
Rokok kretek filter	8,39	5,96	13,11	18,73	18,15
Telur ayam	3,23	3,27	5,77	5,32	6,77
Tempe	2,35	2,39	3,62	3,63	3,32
Mie instan	1,95	1,91	3,63	3,14	2,96
<u>Bukan Makanan</u>					
Perumahan	21,17	29,37	31,14	30,99	26,44
Bensin	8,04	12,12	10,09	9,04	14,14
Listrik	10,65	11,77	11,78	10,53	13,43
Pendidikan	7,21	7,79	8,07	9,61	9,36

Sumber: BPS Provinsi Lampung, Berita Resmi Statistik (Tema Kemiskinan) 2015 – 2018

Kontribusi terkecil beras pada pembentukan garis makanan di perkotaan pada periode 2014 – 2018 terjadi pada tahun 2014. Pada tahun tersebut, komoditas beras memberikan sumbangan sebesar 17,14 persen terhadap garis kemiskinan makanan perkotaan.

Pada posisi kedua, komoditas yang secara konsisten memberikan kontribusi terbesar terhadap garis kemiskinan di perkotaan pada kurun waktu 2014 – 2018 adalah rokok kretek filter. Barang ini memberikan sumbangan terhadap pembentukan garis kemiskinan makanan di perkotaan pada kisaran 5,96 persen sampai dengan 18,73 persen pada selang waktu lima tahun terakhir. Kontribusi rokok kretek filter ini menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat dari tahun ke tahun kecuali pada tahun 2015. (Tabel 3.2).

Sementara itu, untuk pembentukan garis kemiskinan bukan makanan di perkotaan, komoditas yang secara konsisten paling mendominasi adalah perumahan dan bensin. Perumahan memberikan kontribusi dalam kisaran 21,17 persen sampai dengan 31,14 selama lima tahun terakhir. Adapun komoditas bensin, secara konsisten berada pada peringkat kedua pembentukan garis kemiskinan bukan makanan di perkotaan. Kontribusi terbesar komoditas ini tercatat pada tahun 2018 dengan nilai sebesar 14,14 persen. Sementara itu, kontribusi terkecil komoditas ini terjadi pada tahun 2014 dengan nilai sebesar 8,04 persen.

Untuk daerah perdesaan, kondisi yang sama juga terjadi dimana beras masih sangat dominan dalam pembentukan garis kemiskinan makanan. Bahkan kontribusi beras terbilang cukup tinggi selama kurun waktu 2014 – 2018. Dalam rentang waktu tersebut, secara rata-rata komoditas beras memberikan kontribusi sebesar 31,67 persen terhadap pembentukan garis kemiskinan makanan. Pada tahun 2016, sumbangan beras terhadap garis kemiskinan makanan di perdesaan bahkan sempat menyentuh angka 39,27 persen.

Di peringkat kedua, komoditas yang berpengaruh besar terhadap pembentukan garis kemiskinan makanan adalah rokok kretek filter dengan kontribusi sekitar 4,03 persen sampai dengan 14,16 persen.

Adapun untuk garis kemiskinan bukan makanan, kondisi yang terjadi di perdesaan hampir sama dengan di perkotaan. Pembentukan garis kemiskinan bukan makanan di kedua wilayah tersebut didominasi oleh dua komoditas yang sama, yaitu perumahan dan

bensin. Kedua komoditas tersebut secara konsisten menjadi penyumbang utama pembentukan garis kemiskinan bukan makanan dalam kurun waktu 2014 – 2018.

Tabel 3.3 Daftar Komoditas yang Memberi Pengaruh Besar pada Kenaikan Garis Kemiskinan di Perdesaan Provinsi Lampung, 2014 - 2018

Jenis Komoditi	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<u>Makanan</u>					
Beras	24,34	28,42	39,27	30,85	35,45
Rokok kretek filter	5,17	4,03	7,24	14,16	11,18
Telur ayam	2,91	2,53	4,38	3,98	4,21
Tempe	2,92	2,49	4,69	4,91	5,18
Mie instan	2,23	2,19	3,86	3,40	3,22
<u>Bukan Makanan</u>					
Perumahan	24,41	25,77	29,71	29,19	25,56
Bensin	10,93	13,05	12,45	12,07	18,26
Listrik	8,45	9,73	8,59	8,12	10,73

Sumber: BPS Provinsi Lampung, Berita Resmi Statistik (Tema Kemiskinan) 2015 – 2018

Pada tahun 2018, terjadi peningkatan kontribusi komoditas bensin pada pembentukan garis kemiskinan bukan makanan. Komoditas ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada pembentukan garis kemiskinan bukan makanan baik di perdesaan (18,26 persen) maupun di perkotaan (14,14 persen).

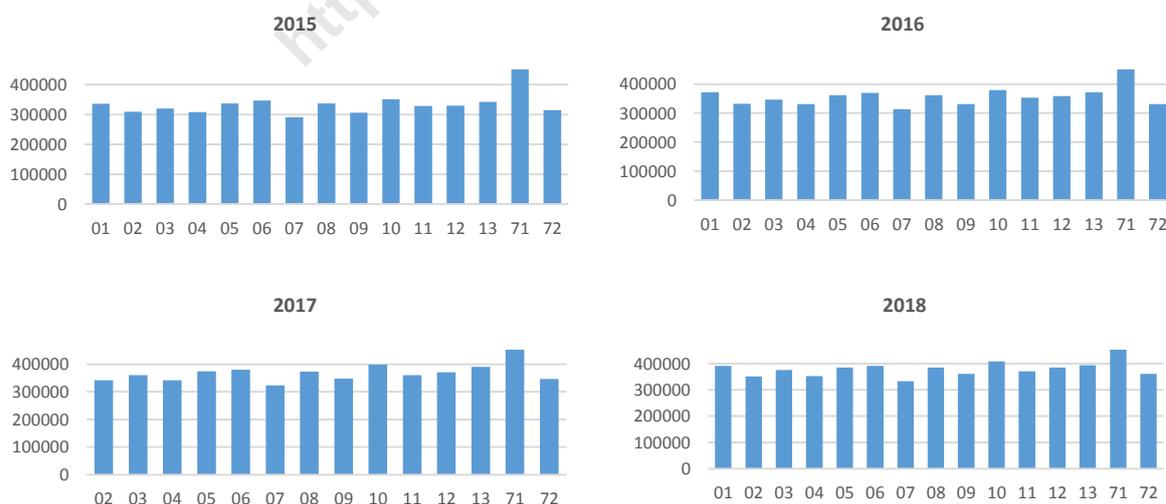
Selama periode 2014 – 2018, beras, rokok kretek filter, perumahan dan bensin adalah komoditas yang secara konsisten mendominasi pembentukan garis kemiskinan. Upaya pengendalian terhadap harga-harga komoditas tersebut mutlak dilakukan agar efektivitas upaya penurunan tingkat kemiskinan dapat dilakukan. Hasil studi Bank Dunia menunjukkan bahwa pengendalian harga komoditas, terutama beras, sangat diperlukan mengingat bahwa pada tahun 2005 – 2006 kenaikan harga komoditas ini berpengaruh terhadap meningkatnya jumlah penduduk miskin di Indonesia (Bank Dunia, 2006).

Berdasarkan perhitungan Bank Dunia, kenaikan jumlah penduduk miskin sebesar 17,75 persen pada saat itu terutama disebabkan karena kenaikan harga beras sebesar 33 persen. Selain itu, dengan meningkatnya kontribusi bensin terhadap pembentukan garis kemiskinan bukan makanan, pengendalian harga komoditas ini juga perlu mendapat perhatian yang serius. Penelitian yang dilakukan oleh Wibowo (2015) menunjukkan bahwa

kelompok termiskin menerima dampak negatif langsung dari kenaikan bahan bakar minyak (BBM) karena lebih rendahnya daya beli mereka dibandingkan dengan kelompok kaya. Kenaikan harga BBM yang sudah menjadi salah satu kebutuhan penduduk miskin akan mempersempit kemampuan belanja dari penduduk miskin tersebut.

Selanjutnya, garis kemiskinan dapat dibedakan menurut kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Hal ini dilakukan karena setiap kabupaten/kota mempunyai perbedaan karakteristik wilayah, tingkat harga dan pola konsumsi penduduknya. Gambar 3.2 menunjukkan garis kemiskinan untuk kabupaten/kota di Lampung tahun 2015 – 2018. Dari gambar tersebut terlihat bahwa garis kemiskinan yang paling rendah di Lampung adalah garis kemiskinan di Kabupaten Way Kanan. Pada tahun 2015, garis kemiskinan di Way Kanan adalah 291.207 rupiah per kapita per bulan. Kemudian pada tahun 2016, garis kemiskinan naik menjadi 313.733 rupiah per kapita per bulan. Setahun kemudian, garis kemiskinan kembali meningkat menjadi 323.691 rupiah per kapita per bulan. Pada tahun 2018, terjadi peningkatan garis kemiskinan yang cukup signifikan yaitu naik menjadi 333.033 rupiah per kapita per bulan.

Gambar 3.2 Garis Kemiskinan menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2015 – 2018 (Rupiah/Kapita/Bulan)



01 = Lampung Barat
 02 = Tanggamus
 03 = Lampung Selatan
 04 = Lampung Timur
 05 = Lampung Tengah
 06 = Lampung Utara
 07 = Way Kanan
 08 = Tulang Bawang

09 = Pesawaran
 10 = Pringsewu
 11 = Mesuji
 12 = Tulang Bawang Barat
 13 = Pesisir Barat
 71 = Bandar Lampung
 72 = Metro

Sumber: BPS Provinsi Lampung, Berita Resmi Statistik (Tema Kemiskinan) 2015 – 2018

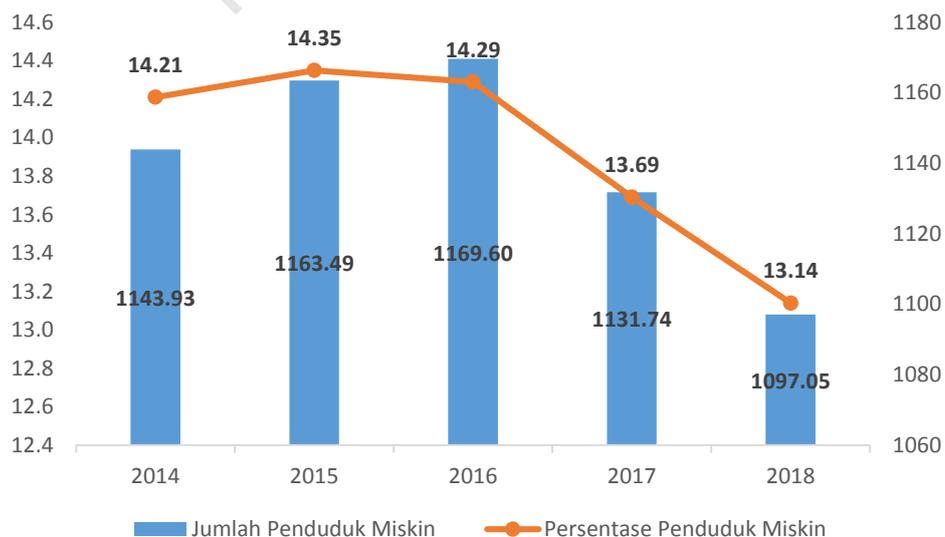
Pada periode 2015 – 2016, garis kemiskinan terendah kedua berada di Pesawaran yaitu 305.540 rupiah per kapita per bulan (2015) dan 330.874 rupiah per kapita per bulan (2016). Namun, keadaan yang berbeda terjadi pada periode 2017 – 2018, dimana garis kemiskinan terendah kedua berada di Kabupaten Tanggamus dengan besaran 341.443 rupiah per kapita per bulan (2017) dan 351.167 rupiah per kapita per bulan (2018).

Sedangkan garis kemiskinan tertinggi selama periode 2015 – 2018 berada pada Kota Bandar Lampung. Pada tahun 2015, besaran garis kemiskinannya mencapai 476.055 rupiah per kapita per bulan. Besaran ini terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai 562.277 rupiah per kapita per bulan.

3.2 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin

Gambar 3.3 memperlihatkan perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin di Lampung tahun 2014 – 2018. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir terlihat bahwa penduduk miskin Lampung menunjukkan perkembangan yang sedikit berfluktuasi dengan kecenderungan menurun. Kondisi tersebut tidak hanya berlaku untuk jumlah penduduk miskin secara absolut, namun juga untuk persentase penduduk miskin (P_0).

Gambar 3.3 Jumlah Penduduk Miskin (000 jiwa) dan Persentase Penduduk Miskin (P_0) di Provinsi Lampung, 2014 - 2018



Sumber: BPS Provinsi Lampung, Berita Resmi Statistik (Tema Kemiskinan) 2015 – 2018

Upaya untuk mengatasi kemiskinan di Provinsi Lampung telah menunjukkan hasil yang cukup signifikan. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, jumlah penduduk miskin mengalami penurunan sebesar 46,88 ribu jiwa. Pada tahun 2014, jumlah penduduk miskin tercatat masih sebanyak 1.143,93 ribu jiwa. Namun pada tahun 2018, angka penduduk miskin tersebut berkurang menjadi 1.097,05 ribu jiwa. Pencapaian tersebut berjalan cukup fluktuatif, dimana pada tahun 2015 hingga 2016 jumlah penduduk miskin di Provinsi Lampung justru mengalami kenaikan dan sempat menyentuh angka 1.169,60 ribu jiwa. Setahun kemudian yaitu pada tahun 2017, jumlah penduduk miskin mulai mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi 1.131,74 ribu jiwa. Penurunan penduduk miskin pada saat itu merupakan yang tertinggi selama rentang waktu 2014 -2018.

Selain itu, *headcount poverty rate* (P_0) pada tahun 2014 – 2018 juga menunjukkan pola yang hampir sama dengan pergerakan jumlah penduduk miskin. Pada tahun 2015, persentase penduduk miskin mengalami peningkatan menjadi 14,35 persen dari kondisi pada tahun 2014 yang nilainya 14,21 persen. Selanjutnya pada tahun 2016 - 2018, persentase penduduk miskin turun selama tiga tahun berturut-turut menjadi 14,29 persen, 13,69 persen dan 13,14 persen.

Gambar 3.4 Jumlah Penduduk Miskin (000) Jiwa menurut Daerah Tempat Tinggal di Provinsi Lampung, 2014 - 2018



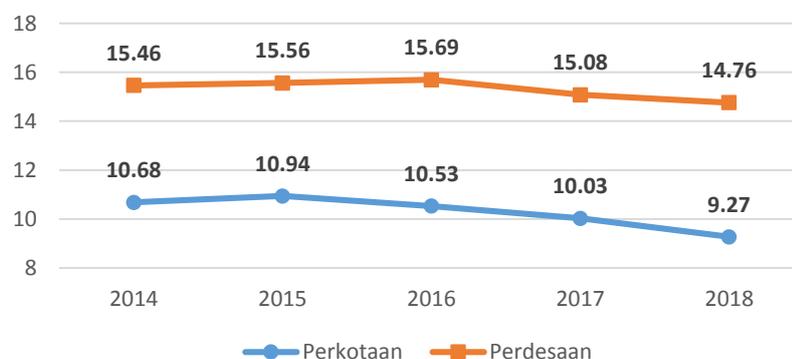
Sumber: BPS Provinsi Lampung, Berita Resmi Statistik (Tema Kemiskinan) 2015 – 2018

Adapun perkembangan penduduk miskin menurut tipe daerah untuk tahun 2014 – 2018 secara umum menunjukkan pola yang tidak terlalu jauh berbeda dengan pola yang ditunjukkan oleh perkembangan penduduk miskin untuk Provinsi Lampung secara keseluruhan (Gambar 3.4)

Di daerah perkotaan, jumlah penduduk miskin menunjukkan kecenderungan yang menurun meskipun mengalami fluktuasi terutama pada tahun 2015 - 2016. Pada kedua tahun tersebut, jumlah penduduk miskin sempat mengalami kenaikan. Pada tahun 2018, jumlah penduduk miskin di perkotaan tercatat sebanyak 228,82 ribu orang. Jumlah ini kembali menunjukkan kenaikan penduduk miskin dibandingkan dengan kondisi tahun sebelumnya, dimana jumlah penduduk miskin pada tahun 2017 sebanyak 228,32 ribu orang.

Kondisi yang sedikit berbeda terjadi di wilayah perdesaan. Pada kurun waktu 2014–2018 jumlah penduduk miskin mengalami tren penurunan meskipun sempat berfluktuatif. Penduduk miskin di perdesaan pada tahun 2014, sebanyak 919,73 ribu jiwa. Namun kenaikan jumlah penduduk miskin terjadi pada tahun 2015 dan 2016 yaitu masing-masing menjadi 930,22 ribu jiwa dan 936,21 ribu jiwa. Pada tahun berikutnya, jumlah penduduk miskin turun menjadi 903,41 ribu jiwa. Penurunan ini terus berlangsung hingga tahun 2018 mencapai 868,22 ribu jiwa. Secara umum terlihat bahwa perkembangan penduduk miskin di daerah perdesaan lebih dinamis dibandingkan dengan daerah perkotaan. Kondisi tersebut terlihat dari laju penurunan maupun peningkatan penduduk miskin di perdesaan yang lebih besar daripada di perkotaan.

Gambar 3.5 Perkembangan Persentase Penduduk Miskin menurut Daerah Tempat Tinggal di Provinsi Lampung, 2014 - 2018



Sumber: BPS Provinsi Lampung, Berita Resmi Statistik (Tema Kemiskinan) 2015 – 2018

Secara persentase, penduduk miskin di wilayah perdesaan lebih tinggi dibandingkan wilayah perkotaan. Hal ini sejalan dengan absolut penduduk miskinnya. Pada Gambar 3.5 sebelumnya terlihat trend perubahan persentase penduduk miskin di Provinsi Lampung baik di wilayah perkotaan dan perdesaan.

Pada tahun 2014, persentase penduduk miskin di perdesaan tercatat sebesar 15,46 persen. Selanjutnya persentase penduduk miskin tersebut mengalami kenaikan menjadi 15,56 persen pada tahun 2015 dan naik kembali pada tahun 2016 menjadi 15,69 persen. Pada tahun 2017, persentase penduduk miskin di wilayah perdesaan mulai mengalami penurunan menjadi 15,08 persen. Dan *trend* penurunan ini berlangsung hingga 2018 mencapai 14,76 persen.

Untuk daerah perkotaan, persentase penduduk miskinnya terlihat lebih rendah daripada di perdesaan. Pada tahun 2014, persentase penduduk miskin di perkotaan tercatat 10,68 persen. Angka ini sempat meningkat pada tahun 2015 menjadi 10,94 persen. Namun, pada tahun-tahun berikutnya persentase penduduk miskin di perkotaan cenderung menunjukkan penurunan. Bahkan jika wilayah perkotaan dibandingkan dengan perdesaan, terlihat bahwa laju penurunan persentase penduduk miskin di daerah perkotaan lebih besar daripada di perdesaan. Selama 2014 – 2018, rata-rata penurunan persentase penduduk miskin di perkotaan tercatat sebesar 0,35 poin per tahun. Penurunan terbesar terjadi pada tahun 2018, dimana pada saat itu persentase penduduk miskin turun sebesar 0,76 poin.

Tabel 3.4 memberikan informasi mengenai jumlah penduduk miskin menurut kabupaten/kota di Lampung selama tahun 2015 – 2018. Selama periode 2015 – 2018, Lampung Utara merupakan kabupaten di Provinsi Lampung dengan tingkat keberhasilan yang tertinggi dalam usaha menurunkan jumlah penduduk miskin di wilayahnya. Pada tahun 2015, jumlah penduduk miskin di Lampung Utara masih tercatat sebanyak 140,41 ribu jiwa. Secara signifikan jumlah ini terus berkurang hingga tahun 2018, jumlah penduduk miskin di Lampung Utara tercatat sebanyak 128,02 ribu jiwa. Kabupaten Lampung Utara mampu memangkas jumlah penduduk miskinnya hingga 12,39 ribu jiwa dalam kurun waktu empat tahun. Selain Lampung Utara, Kabupaten Lampung Selatan juga merupakan salah satu wilayah dengan pengurangan jumlah penduduk miskin tertinggi, yaitu mencapai 9,17 ribu jiwa. Pada tahun 2015 jumlah penduduk miskin di Lampung Selatan adalah 157,71 orang, dan pada tahun 2018 jumlahnya menjadi 148,54 ribu saja.

**Tabel 3.4 Jumlah Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung,
2015 – 2018 (000 jiwa)**

Kabupaten/Kota	Tahun			
	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Lampung Barat	42,24	44,90	42,71	40,62
Tanggamus	81,56	81,34	77,53	73,77
Lampung Selatan	157,71	158,38	150,11	148,54
Lampung Timur	170,11	172,61	167,64	162,94
Lampung Tengah	164,44	165,67	162,38	160,12
Lampung Utara	140,41	139,50	131,78	128,02
Way Kanan	63,09	63,64	62,00	60,16
Tulang Bawang	44,15	44,26	44,31	43,10
Pesawaran	75,37	74,45	71,64	70,14
Pringsewu	45,58	45,72	44,41	41,64
Mesuji	16,02	15,74	15,16	15,01
Tulang Bawang Barat	21,79	22,39	21,77	21,93
Pesisir Barat	24,03	24,20	23,76	22,98
Kota Bandar Lampung	100,76	100,54	100,50	93,04
Kota Metro	16,24	16,26	16,06	15,06
Lampung	1.163,49	1.169,60	1.131,73	1.097,05

Sumber: Susenas 2015 – 2018, BPS Provinsi Lampung

Sementara itu, selama kurun waktu 2015 - 2018, Mesuji merupakan kabupaten dengan jumlah penurunan penduduk miskin yang terendah di wilayah Provinsi Lampung. Jumlah penduduk miskin yang berhasil dientaskan dari bawah garis kemiskinan tercatat sebanyak 1,01 ribu orang selama rentang waktu 4 tahun terakhir. Meskipun upaya pengentasan kemiskinan di Mesuji memperlihatkan hasil yang kurang signifikan dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Lampung, namun kabupaten Mesuji diuntungkan dari sisi jumlah penduduk miskin yang tidak sebanyak penduduk miskin di kabupaten lainnya.

Secara keseluruhan, upaya penurunan kemiskinan di kabupaten/kota di Lampung telah menunjukkan hasil yang diharapkan. Namun demikian, selama empat tahun tersebut upaya pengentasan kemiskinan selalu mengalami penyesuaian agar implementasinya mudah diterapkan. Upaya pengentasan kemiskinan hendaknya tidak hanya difokuskan pada penduduk miskin, namun perhatian hendaknya juga diberikan kepada penduduk yang berada di sekitar garis kemiskinan. Penduduk yang berada di sekitar garis kemiskinan

tersebut berpeluang juga terjerembab menjadi miskin manakala terjadi guncangan dalam perekonomian.

Tabel 3.5 Persentase Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2015 – 2018

Kabupaten/Kota	Tahun			
	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Lampung Barat	14.18	15.06	14.32	13.54
Tanggamus	14.26	14.05	13.25	12.48
Lampung Selatan	16.27	16.16	15.16	14.86
Lampung Timur	16.91	16.98	16.35	15.76
Lampung Tengah	13.30	13.28	12.90	12.62
Lampung Utara	23.20	22.92	21.55	20.85
Way Kanan	14.61	14.58	14.06	13.52
Tulang Bawang	10.25	10.20	10.09	9.70
Pesawaran	17.61	17.31	16.48	15.97
Pringsewu	11.80	11.73	11.30	10.50
Mesuji	8.20	8.00	7.66	7.55
Tulang Bawang Barat	8.23	8.40	8.11	8.10
Pesisir Barat	15.81	15.91	15.61	14.98
Kota Bandar Lampung	10.33	10.15	9.94	9.04
Kota Metro	10.29	10.15	9.89	9.14
Lampung	14.35	14.29	13.69	13.14

Sumber: Susenas 2015 – 2018, BPS Provinsi Lampung

Persentase penduduk miskin di masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Lampung menampilkan urutan yang berbeda dengan jumlah penduduk miskin. Berdasarkan tabel 3.5 perkembangan persentase penduduk miskin (P_0) menurut kabupaten/kota, terlihat bahwa Lampung Utara dan Pesawaran merupakan kabupaten dengan tingkat kemiskinan yang tertinggi di Provinsi Lampung selama kurun waktu empat tahun terakhir ini. Adapun Kabupaten Lampung Timur, meskipun memiliki jumlah penduduk miskin yang terbanyak se-Provinsi Lampung, namun tingkat kemiskinannya bukan yang tertinggi.

Pada tahun 2015, tingkat kemiskinan di Lampung Utara sebesar 23,20 persen dan merupakan yang tertinggi se-Provinsi Lampung. Pada tahun yang sama tingkat kemiskinan

terendah berada di Kabupaten Mesuji yaitu sebesar 7,55 persen. Hal ini berlangsung hingga tahun 2018.

Dari sisi kecepatan pengentasan kemiskinan, terlihat bahwa Lampung Utara dan Tanggamus merupakan dua wilayah di Provinsi Lampung yang tingkat keberhasilannya melebihi kabupaten/kota lainnya. Selama kurun waktu empat tahun terakhir, tingkat kemiskinan di Lampung Utara dan Tanggamus ini masing-masing berkurang sebanyak 2,35 poin dan 1,78 poin.

3.3 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1)

Indeks kedalaman kemiskinan digunakan untuk mengetahui jarak antara rata-rata pengeluaran rumah tangga miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin besar nilai indeks P_1 menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin menjauh dari garis kemiskinan. Dengan demikian, semakin besar nilai P_1 maka semakin besar pula upaya yang diperlukan untuk mengentaskan penduduk miskin dari keterpurukannya.

Tabel 3.6 memberikan informasi mengenai tingkat kedalaman kemiskinan untuk masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Lampung selama tahun 2015 – 2018. Tingkat kedalaman kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Lampung terlihat sangat bervariasi baik dalam hal nilai maupun kecenderungannya. Diantara lima belas kabupaten/kota di Provinsi Lampung, indeks kedalaman kemiskinan di Lampung Utara merupakan yang paling tinggi. Nilai P_1 di Lampung Utara berada pada rentang antara 2,96 sampai dengan 4,68. Meskipun demikian jika dilihat dari perkembangannya selama empat tahun terakhir, terlihat adanya penurunan nilai indeks P_1 yang dapat mengindikasikan adanya peningkatan pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan.

Selain Lampung Utara, kabupaten dengan nilai indeks P_1 yang relatif tinggi di Provinsi Lampung adalah Pesawaran. Selama kurun waktu 2015 – 2018, rata-rata indeks P_1 di kabupaten ini sebesar 3,02. Selain itu, dalam kurun waktu setahun terakhir, terlihat adanya kecenderungan yang sedikit meningkat pada beberapa kabupaten/kota seperti Tanggamus, Lampung Selatan dan Pesisir Barat. Kondisi ini perlu mendapat perhatian mengingat dengan meningkatnya indeks P_1 menunjukkan semakin besarnya usaha yang diperlukan untuk melakukan pengentasan kemiskinan. Selain itu, peningkatan indeks P_1

juga menunjukkan semakin terpuruknya penduduk miskin karena rata-rata pengeluarannya semakin menjauhi garis kemiskinan.

Tabel 3.6 Indeks Kedalaman Kemiskinan menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2015 – 2018

Kabupaten/Kota	Tahun			
	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Lampung Barat	2.37	2.89	2.15	1.84
Tanggamus	1.98	2.01	1.81	2.36
Lampung Selatan	2.66	2.64	2.36	2.47
Lampung Timur	2.51	3.10	2.96	2.91
Lampung Tengah	2.41	2.15	1.99	1.62
Lampung Utara	4.08	4.68	4.19	2.96
Way Kanan	2.18	2.69	2.05	2.05
Tulang Bawang	1.84	2.00	1.53	1.28
Pesawaran	3.12	2.77	3.31	2.87
Pringsewu	1.40	1.78	1.71	1.44
Mesuji	1.04	1.39	1.13	0.82
Tulang Bawang Barat	1.48	1.20	1.08	1.08
Pesisir Barat	2.52	2.76	2.08	2.61
Kota Bandar Lampung	1.26	1.65	1.48	1.38
Kota Metro	1.54	1.81	1.92	1.61
Lampung	2.36	2.63	2.16	2.04

Sumber: Susenas 2015 – 2018, BPS Provinsi Lampung

Secara umum, tingkat kesenjangan penduduk miskin di Provinsi Lampung ditunjukkan oleh nilai indeks P_1 yang berada pada kondisi relatif moderat. Pada tahun 2015, indeks P_1 untuk Lampung tercatat 2,36. Kemudian indeks kedalaman mengalami peningkatan menjadi 2,63 pada tahun 2016. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk miskin di Provinsi Lampung justru semakin terpuruk. Meskipun demikian pemerintah daerah berhasil memperbaiki situasi tersebut yang ditunjukkan dengan membaiknya indikator kedalaman kemiskinan menjadi 2,16 pada tahun 2017. Upaya pengentasan kemiskinan pada tahun 2018 juga menunjukan hasil yang bagus dengan semakin menurunnya indeks P_1 menjadi 2,04. Penurunan indeks P_1 tersebut memberikan gambaran semakin membaiknya situasi kemiskinan karena pengeluaran penduduk miskin yang semakin mendekati garis kemiskinan.

Pada periode Maret 2017-Maret 2018, jika dirinci menurut daerah, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) di daerah pedesaan pada periode 2017 dan 2018 lebih tinggi dibanding di perkotaan. Artinya, kesenjangan rata-rata pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan di pedesaan relatif lebih besar daripada di perkotaan. Sementara itu, Gambar 3.6 juga terlihat bahwa Indeks Kedalaman Kemiskinan di perkotaan maupun di pedesaan cenderung mengalami penurunan.

Gambar 3.6 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) Provinsi Lampung menurut Daerah, Maret 2017 – Maret 2018



Sumber: Susenas Maret 2017 - 2018, BPS Provinsi Lampung

3.4 Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2)

Selain Indeks Kedalaman Kemiskinan, indikator lain yang perlu dilihat adalah Indeks Keparahan Kemiskinan. Selain menekan jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan seharusnya juga dapat mengurangi Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan. Gambar 3.7 menyajikan Indeks Keparahan Kemiskinan periode Maret 2017 dan Maret 2018. Jika dirinci menurut daerah, Indeks Keparahan Kemiskinan pada periode tersebut turun dari 0,35 menjadi 0,33 di perkotaan dan dari 0,57 menjadi 0,54 di pedesaan.

Gambar 3.7 Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) Provinsi Lampung menurut Daerah, Maret 2017 – Maret 2018



Sumber: Susenas Maret 2017 - 2018, BPS Provinsi Lampung

Indeks keparahan kemiskinan (P_2) menunjukkan tingkat kesenjangan pengeluaran antara penduduk miskin. Tabel 3.7 memberikan informasi mengenai nilai indeks P_2 untuk masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Lampung selama tahun 2015 – 2018.

Tabel 3.7 Indeks Keparahan Kemiskinan menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, Tahun 2015 – 2018

Kabupaten/Kota	Tahun			
	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Lampung Barat	0.56	0.78	0.49	0.36
Tanggamus	0.46	0.43	0.35	0.62
Lampung Selatan	0.71	0.64	0.53	0.67
Lampung Timur	0.63	0.86	0.78	0.78
Lampung Tengah	0.59	0.58	0.45	0.32
Lampung Utara	1.14	1.37	1.15	0.63
Way Kanan	0.49	0.70	0.47	0.50
Tulang Bawang	0.51	0.59	0.36	0.25
Pesawaran	0.75	0.74	0.87	0.72
Pringsewu	0.25	0.42	0.39	0.31
Mesuji	0.24	0.37	0.27	0.14
Tulang Bawang Barat	0.36	0.26	0.21	0.22
Pesisir Barat	0.64	0.72	0.48	0.59
Kota Bandar Lampung	0.24	0.47	0.36	0.36
Kota Metro	0.37	0.54	0.60	0.42
Lampung	0.59	0.70	0.51	0.48

Sumber: Susenas 2015 – 2018, BPS Provinsi Lampung

Dari lima belas kabupaten/kota di Provinsi Lampung, Kabupaten Mesuji merupakan wilayah dengan nilai indeks P_2 yang relatif paling rendah untuk kurun waktu empat tahun

terakhir. Rata-rata indeks P_2 Kabupaten Mesuji adalah 0,25 per tahun. Bahkan pada tahun 2018, nilai P_2 kabupaten ini mencapai nilai terendahnya yaitu 0,14 yang sekaligus menunjukkan rendahnya tingkat kesenjangan pengeluaran antara penduduk miskin di Kabupaten Mesuji. Kabupaten Lampung Tengah merupakan kabupaten dengan indeks P_2 yang relatif stabil bahkan cenderung menunjukkan pola penurunan. Selama 2015 – 2018, indeks P_2 berada pada kisaran 0,32 sampai dengan 0,59. Situasi tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesenjangan antar penduduk miskin di wilayah tersebut relatif terjaga bahkan semakin membaik.

Nilai indeks P_2 yang tertinggi selama tahun 2015 – 2018 di Provinsi Lampung tercatat di Kabupaten Lampung Utara. Rata-rata indeks P_2 kabupaten ini adalah 1,06 per tahun untuk kurun waktu 2015 – 2018. Pada tahun 2016, indeks P_2 di wilayah ini mencapai titik tertingginya yaitu 1,14. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan yang cukup tinggi diantara penduduk miskin di Lampung Utara pada tahun tersebut.

Secara umum, kondisi ketimpangan antara penduduk miskin di Lampung selama lima tahun terakhir belum memperlihatkan adanya penurunan yang signifikan. Pada tahun 2015, indeks P_2 Provinsi Lampung adalah 0,59. Indeks P_2 pada tahun berikutnya mengalami peningkatan menjadi 0,70. Pada tahun 2017, indeks P_2 kembali turun menjadi 0,51. Tren ini terus menurun hingga tahun 2018 menjadi 0,48. Artinya tingkat kesenjangan antara penduduk miskin semakin berkurang.

BAB IV

KETIMPANGAN PENGELUARAN PROVINSI LAMPUNG

Distribusi pendapatan merupakan salah satu aspek kemiskinan yang perlu dilihat karena merupakan ukuran kemiskinan relatif. Oleh karena data pendapatan sulit diperoleh, pengukuran distribusi pendapatan didekati dengan menggunakan data pengeluaran. Ukuran yang menggambarkan ketidakmerataan pendapatan antara lain adalah Koefisien Gini (*Gini Ratio*), Indeks Theil, Indeks-L, dan Ukuran Bank Dunia.

4.1 *Gini Ratio*

Gini Ratio merupakan ukuran tingkat ketimpangan pendapatan penduduk yang banyak digunakan di berbagai negara. Koefisien Gini didasarkan pada kurva Lorenz, sebuah kurva frekuensi kumulatif yang membandingkan distribusi pada suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili pemerataan (BPS, 2015). Koefisien Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna.

Perubahan *Gini Ratio* merupakan indikasi dari adanya perubahan distribusi pengeluaran penduduk. Pada periode Maret 2017 dan Maret 2018, *Gini Ratio* di Provinsi Lampung mengalami kenaikan dari 0,334 menjadi 0,346 (Gambar 4.1).

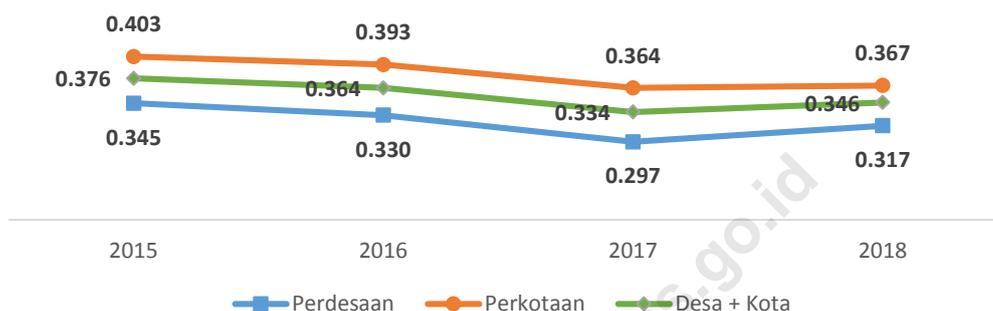
Gambar 4.1 *Gini Ratio* Provinsi Lampung menurut Daerah, Maret 2017 – Maret 2018



Sumber: Susenas Maret 2017 - 2018, BPS Provinsi Lampung

Perkembangan *Gini Ratio* pada periode 2015-2018 cenderung mengalami penurunan (Gambar 4.2). Penurunan ini mengindikasikan bahwa distribusi pengeluaran penduduk pada periode tersebut semakin membaik. Meskipun pada tahun 2018 *Gini Ratio* baik di perkotaan maupun perdesaan kembali mengalami kenaikan.

Gambar 4.2 *Gini Ratio* Provinsi Lampung menurut Daerah, 2015 - 2018



Sumber: Susenas 2015 – 2018, BPS Provinsi Lampung

4.2 Indeks Theil

Selain *Gini Ratio* dikenal juga Indeks Theil yang dapat menggambarkan tingkat ketimpangan pengeluaran. Indeks ini lebih sensitif untuk melihat perubahan distribusi pengeluaran pada penduduk kelompok atas (kaya). Selama Maret 2017-Maret 2018, Indeks Theil naik dari 0,203 menjadi 0,223 (Gambar 4.3). Pola serupa juga terjadi baik di daerah perdesaan maupun wilayah perkotaan yang juga mengalami kenaikan.

Gambar 4.3 Indeks Theil Provinsi Lampung menurut Daerah, Maret 2017 – Maret 2018



Sumber: Susenas Maret 2017 - 2018, BPS Provinsi Lampung

4.3 Indeks-L

Indikator ketimpangan pengeluaran lainnya adalah Indeks-L. Indeks ini lebih sensitif untuk melihat perubahan distribusi pengeluaran penduduk pada kelompok bawah. Selama Maret 2017- Maret 2018, Indeks-L naik dari 0,180 menjadi 0,194 (Gambar 4.4). Jika dilihat menurut daerah baik di wilayah perdesaan maupun perkotaan Indeks-L mengalami peningkatan.

Gambar 4.4 Indeks-L Provinsi Lampung menurut Daerah, Maret 2017 – Maret 2018



Sumber: Susenas Maret 2017 - 2018, BPS Provinsi Lampung

4.4 Kriteria Bank Dunia

Indikator lain untuk melihat distribusi pengeluaran antar kelompok penduduk adalah Kriteria Bank Dunia. Kriteria Bank Dunia membagi kelompok penduduk menjadi tiga bagian besar, yaitu 40 persen terbawah, 40 persen menengah, dan 20 persen teratas.

Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk menurut kriteria Bank Dunia terpusat pada 40 persen penduduk dengan pengeluaran terendah. Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk ini digambarkan oleh porsi pengeluaran dari kelompok pengeluaran ini terhadap seluruh pengeluaran penduduk, dengan penggolongan ketimpangan pengeluaran sebagai berikut:

- Ketimpangan pengeluaran tinggi (*highly inequality*), jika porsi pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terendah kurang dari 12 persen;
- Ketimpangan pengeluaran sedang (*moderate inequality*), jika porsi pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terendah berada diantara 12 persen sampai dengan 17 persen;

c. Ketimpangan pengeluaran rendah (*low inequality*), jika porsi pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terendah diatas 17 persen.

Secara keseluruhan, pada tahun 2017-2018 ketimpangan pengeluaran menurut kriteria Bank Dunia cenderung rendah (*low inequality*). Akan tetapi, pola berbeda terjadi bila dilihat menurut daerah dimana ketimpangan pengeluaran di perdesaan cenderung rendah, sedangkan ketimpangan pengeluaran di perkotaan cenderung sedang (Gambar 4.5).

Gambar 4.5 Distribusi Pengeluaran Penduduk 40 Persen Terendah menurut Daerah dan Kriteria Bank Dunia, Maret 2017 – Maret 2018



Sumber: Susenas Maret 2017 - 2018, BPS Provinsi Lampung

BAB V

PROFIL RUMAH TANGGA MISKIN PROVINSI LAMPUNG

Pada tingkat regional ada bermacam-macam karakteristik yang mungkin berkaitan dengan kemiskinan. Beberapa karakteristik yang mudah menggambarkan kondisi kemiskinan rumah tangga diantaranya terkait karakteristik sosial demografi, pendidikan, ketenagakerjaan serta kondisi tempat tinggal (perumahan).

5.1 Karakteristik Sosial Demografi

Dalam laporan ini, karakteristik sosial demografi yang disajikan meliputi rata-rata jumlah anggota rumah tangga, persentase perempuan sebagai kepala rumah tangga, rata-rata usia kepala rumah tangga, dan tingkat pendidikan kepala rumah tangga (dilihat dari indikator rata-rata lamanya bersekolah kepala rumah tangga). Keempat karakteristik tersebut dibandingkan dengan melihat proporsi rumah tangga yang dikategorikan sebagai miskin dan tidak miskin (Tabel 5.1).

Tabel 5.1 Karakteristik Sosial Demografi Rumah Tangga Miskin dan Rumah Tangga Tidak Miskin menurut Daerah di Provinsi Lampung, 2018

Karakteristik Rumah Tangga/Daerah	Miskin	Tidak Miskin
(1)	(2)	(3)
1. Rata-rata jumlah anggota rumah tangga:		
- Perkotaan (K)	4.94	3.93
- Perdesaan (D)	4.25	3.58
- Perkotaan + Perdesaan (K + D)	4.34	3.69
2. Persentase perempuan sebagai kepala rumah tangga:		
- Perkotaan (K)	23.54	12.94
- Perdesaan (D)	9.50	10.62
- Perkotaan + Perdesaan (K + D)	11.35	11.31
3. Rata-rata umur kepala rumah tangga (tahun):		
- Perkotaan (K)	51.24	46.78
- Perdesaan (D)	48.05	47.42
- Perkotaan + Perdesaan (K + D)	48.47	47.23
4. Rata-rata lama sekolah kepala rumah tangga:		
- Perkotaan (K)	7.35	10.00
- Perdesaan (D)	6.60	7.80
- Perkotaan + Perdesaan (K + D)	6.71	8.50

Sumber: Susenas Maret 2018, BPS Provinsi Lampung

Rumah tangga miskin cenderung mempunyai anggota rumah tangga lebih banyak. Sementara itu, terkait dengan distribusi umur, rata-rata umur kepala rumah tangga miskin tercatat 48,47 tahun, lebih tinggi dibanding rata-rata umur kepala rumah tangga tidak miskin yang sebesar 47,23 tahun. Rata-rata lama sekolah kepala rumah tangga miskin juga lebih rendah dibandingkan dengan kepala rumah tangga tidak miskin, yaitu 6,71 tahun banding 8,50 tahun. Pada Tabel 5.1 terlihat bahwa persentase rumah tangga yang dikepalai perempuan, lebih tinggi di rumah tangga miskin dibanding rumah tangga tidak miskin. Artinya, dari seluruh rumah tangga yang kepala rumah tangganya perempuan tercatat sebanyak 11,35 persennya adalah miskin. Pola yang sama terjadi di perkotaan namun sebaliknya justru terjadi di perdesaan.

5.2 Karakteristik Pendidikan

Tingkat pendidikan juga berperan dalam mempengaruhi angka kemiskinan. Orang yang berpendidikan lebih baik biasanya akan mempunyai peluang yang lebih rendah menjadi miskin. Kemampuan baca tulis dan pendidikan terakhir yang ditamatkan menjadi indikator tingkat pendidikan yang dapat diamati pada rumah tangga miskin dan tidak miskin.

Kepala rumah tangga pada rumah tangga miskin yang tergolong buta huruf (tidak dapat membaca dan menulis huruf latin, huruf arab, dan/atau huruf lainnya) tercatat sebesar 6,51 persen (Tabel 5.2) lebih tinggi dibanding rumah tangga tidak miskin (2,61 persen).

Tabel 5.2 Persentase Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin menurut Kemampuan Membaca dan Menulis Kepala Rumah Tangga dan Daerah di Provinsi Lampung, 2018

Kemampuan Baca Tulis	Rumah Tangga Miskin			Rumah Tangga Tidak Miskin		
	Perkotaan	Perdesaan	Kota + Desa	Perkotaan	Perdesaan	Kota + Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Huruf Latin	92.09	92.10	92.09	98.15	96.37	96.94
Huruf Arab	28.73	27.91	28.03	28.83	34.82	32.91
Huruf Lainnya	5.21	5.53	5.49	10.51	8.52	9.15
Tidak Dapat Membaca & Menulis	5.44	6.70	6.51	1.54	3.11	2.61

Sumber: Susenas Maret 2018, BPS Provinsi Lampung

Dari sisi pendidikan tertinggi yang ditamatkan, persentase kepala rumah tangga miskin yang berpendidikan rendah (tamat SD) lebih tinggi dibanding rumah tangga tidak miskin (Tabel 5.3). Hal ini sejalan dengan yang disajikan pada Tabel 5.1 bahwa kepala rumah tangga miskin memiliki pendidikan lebih rendah daripada kepala rumah tangga tidak miskin. Pola hampir sama terjadi baik di perkotaan dan perdesaan.

Tabel 5.3 Persentase Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin menurut Pendidikan Kepala Rumah Tangga dan Daerah di Provinsi Lampung, 2018

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Rumah Tangga Miskin			Rumah Tangga Tidak Miskin		
	Perkotaan	Perdesaan	Kota + Desa	Perkotaan	Perdesaan	Kota + Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
SD	65.71	67.21	67.01	31.33	54.26	47.37
SMP	18.12	19.80	19.58	18.80	22.13	21.13
SMA	14.66	12.59	12.86	33.95	19.62	23.92
PT	1.52	0.41	0.55	15.92	3.99	7.57

Sumber: Susenas Maret 2018, BPS Provinsi Lampung

Indikasi ini menunjukkan bahwa mereka yang tergolong miskin cenderung berpendidikan rendah, perubahan kebijakan wajib belajar 9 tahun juga turut berpengaruh terhadap distribusi kepala rumah tangga menurut tingkat pendidikan terakhirnya meskipun pergeseran tersebut belum mampu membebaskan mereka dari kemiskinan. Masih rendahnya tingkat pendidikan kepala rumah tangga miskin tersebut perlu mendapatkan perhatian.

Bank Dunia (2007) menemukan adanya kaitan erat antara kemiskinan dan pendidikan. Capaian pendidikan yang lebih tinggi berhubungan dengan tingkat konsumsi rumah tangga yang meningkat pula. Hubungan tersebut terutama menunjukkan nilai korelasi parsial yang lebih besar di daerah perkotaan, dengan demikian rumah tangga di perkotaan menerima manfaat yang jauh lebih besar daripada di perdesaan dari setiap tambahan tahun pendidikan.

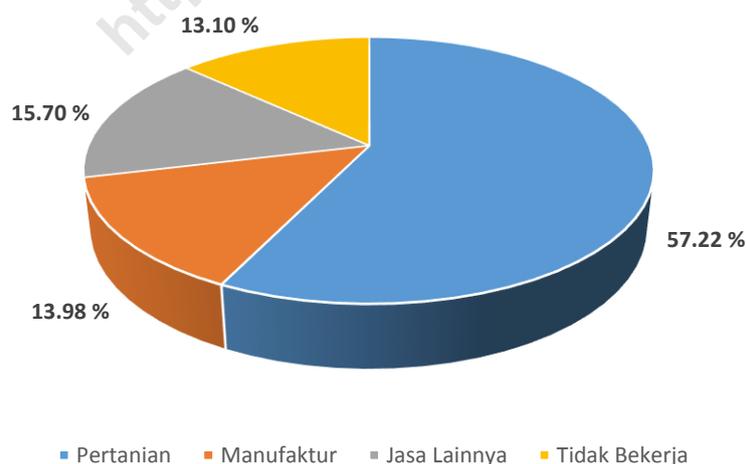
5.3 Karakteristik Ketenagakerjaan

Sumber penghasilan utama rumah tangga menjadi salah satu indikator tingkat kesejahteraan yang diharapkan dapat mencerminkan kondisi sosial ekonomi suatu rumah

tangga. Cerminan tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga dapat dilihat dari status miskin atau tidak miskin suatu rumah tangga yang ditentukan dari rata-rata pengeluaran per kapita per bulan suatu rumah tangga. Salah satu karakteristik ketenagakerjaan yang dapat menggambarkan adanya perbedaan antara rumah tangga miskin dan tidak miskin adalah lapangan usaha atau sektor yang menjadi sumber penghasilan utama rumah tangga. Profil orang miskin seringkali melekat dengan mereka yang bekerja di sektor pertanian, seperti petani gurem, nelayan, buruh tani dan perkebunan.

Gambar 5.1 menunjukkan bahwa tingkat pengangguran/bukan angkatan kerja kepala rumah tangga miskin terbilang relatif tinggi. Pada tahun 2018, terdapat 13,10 persen kepala rumah tangga miskin yang tidak bekerja. Kondisi tersebut cukup memprihatinkan karena situasi kemiskinan yang terjadi tidak hanya karena rendahnya pengeluaran konsumsi namun diduga diakibatkan karena tidak adanya kemampuan untuk membiayai pengeluaran konsumsi rumah tangganya. Meskipun demikian perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui seberapa banyak rumah tangga miskin yang tidak bekerja dan benar-benar tidak memiliki sumber penghasilan.

Gambar 5.1 Persentase Rumah Tangga Miskin menurut Lapangan Usaha Kepala Rumah Tangga di Provinsi Lampung, Tahun 2018



Sumber: Susenas Maret 2018, BPS Provinsi Lampung

Pada tahun 2018, kepala rumah tangga yang bekerja pada lapangan usaha pertanian mencapai 57,22 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sektor pertanian masih menjadi tumpuan utama rumah tangga miskin untuk memperoleh pendapatan. Sementara

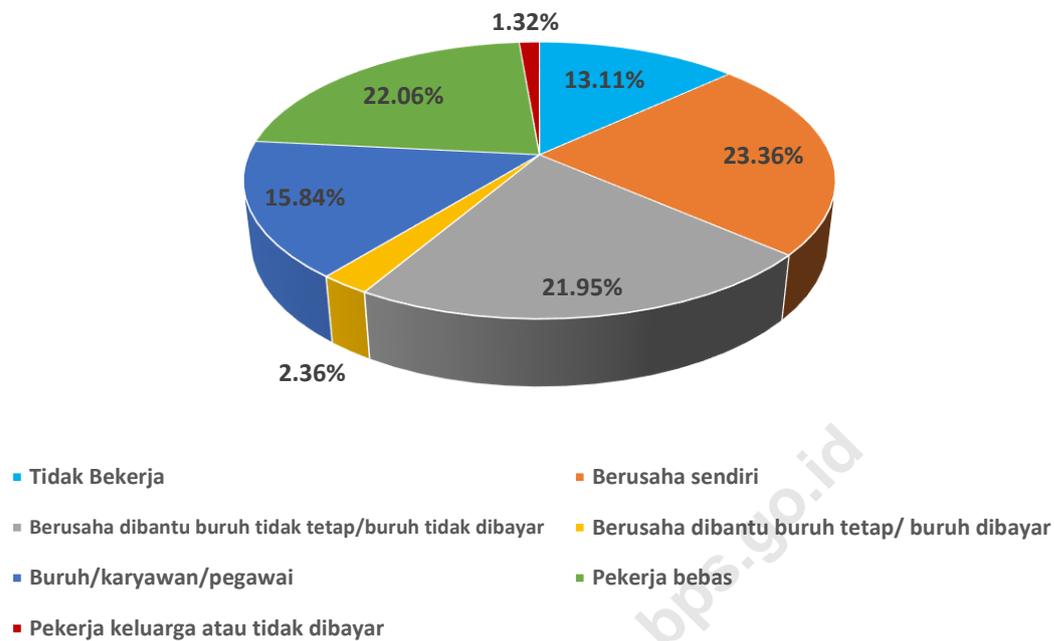
itu dalam kurun waktu empat tahun terakhir, laju pertumbuhan sektor pertanian justru mengalami penurunan. Pada tahun 2015, pertumbuhan pada lapangan usaha ini masih sebesar 3,49 persen. Namun pada tahun 2017, laju pertumbuhan ekonomi dari sektor ini hanya 0,83 persen. Selain kinerjanya yang semakin menurun, sektor pertanian juga dikenal mempunyai tingkat produktivitas yang rendah (OECD, 2015). Disamping itu, Satriawan dan Oktavianti (2012) menyebutkan bahwa faktor ketidakpastian pasar produk-produk pertanian juga turut andil dalam memperburuk situasi kemiskinan di sektor pertanian. Kombinasi faktor-faktor tersebut nampaknya yang menyebabkan adanya korelasi yang kuat antara bekerja di sektor pertanian dan kemiskinan sebagaimana yang ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh Bank Dunia (Bank Dunia, 2007).

Disamping itu, gambar 5.1 juga menunjukkan bahwa terdapat 13,98 persen kepala rumah tangga miskin yang bekerja di sektor industri atau manufaktur. Dalam kaitannya dengan upaya pengentasan kemiskinan, sektor industri mampu memainkan peran yang strategis. Sektor ini dipercaya mampu memberi dukungan terhadap pendapatan dan peningkatan kesejahteraan dalam jangka panjang (Bank Dunia, 2012). Selain itu, sektor industri juga mempunyai efek keterkaitan terhadap sektor hulu dan hilir yang kuat sehingga mampu menciptakan lapangan pekerjaan tambahan.

Dengan demikian, Provinsi Lampung masih memiliki cukup ruang untuk melakukan akselerasi pengentasan kemiskinan. Salah satu upaya yang dapat ditempuh adalah dengan melakukan transfer tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri pengolahan. Meskipun demikian tentunya perlu dilakukan kajian terlebih dahulu agar program pengentasan kemiskinan tersebut dapat berjalan dengan efektif dan tepat guna.

Status pekerjaan juga dapat menjadi salah satu indikator yang dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga. Distribusi rumah tangga miskin menurut status pekerjaan utama kepala rumah tangga yang disajikan pada gambar 5.2 menunjukkan bahwa 45,31 persen diantaranya berstatus sebagai berusaha sendiri atau berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar; 2,36 persen berstatus sebagai berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar; 37,90 persen berstatus sebagai pekerja dibayar (buruh/karyawan/pegawai) dan pekerja bebas (baik di pertanian maupun di non pertanian); dan hanya 1,32 persen yang berstatus sebagai pekerja tidak dibayar.

Gambar 5.2 Persentase Rumah Tangga Miskin menurut Status Pekerjaan Utama Kepala Rumah Tangga di Provinsi Lampung, Tahun 2018



Sumber: Susenas Maret 2018, BPS Provinsi Lampung

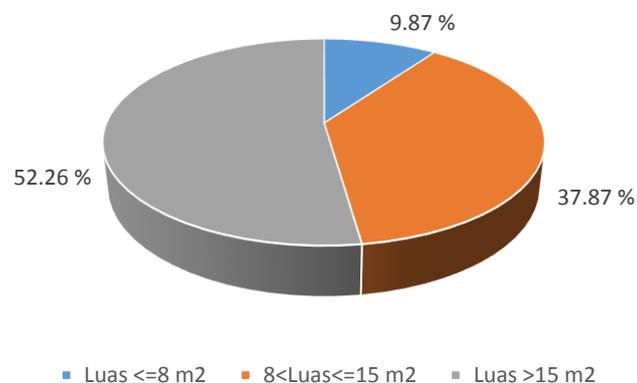
5.4 Karakteristik Tempat Tinggal (Perumahan)

Tempat tinggal merujuk pada kerangka kerja keseluruhan dari kehidupan pribadi rumah tangga. Indikator perumahan dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga antara lain luas dan jenis lantai, atap, dinding, serta fasilitas jamban.

5.4.1 Luas Lantai

Salah satu indikator perumahan yang digunakan untuk menunjukkan tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga adalah keleluasaan pribadi (*privacy*) dalam tempat tinggal. Keleluasaan pribadi tercermin dari luas lantai rumah perkapita (m^2). Suryo (2017) menyatakan bahwa luas minimal bangunan merupakan salah satu indikator kualitas pembangunan perumahan pada suatu negara. Luasan baku tersebut tentunya akan berkembang dinamis sesuai dengan tingkat kesejahteraan dan kemakmuran suatu wilayah. Menurut Yockey (dalam Suryo, 2017), luas ruangan hunian turut berpengaruh terhadap kesehatan dan tingkat stres penghuninya.

Gambar 5.3 Persentase Rumah Tangga Miskin menurut Luas Lantai Per Kapita di Provinsi Lampung, Tahun 2018



Sumber: Susenas Maret 2018, BPS Provinsi Lampung

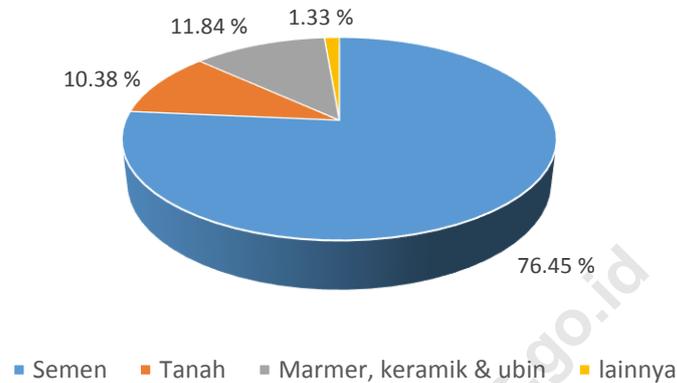
Dalam Susenas, BPS menggunakan ukuran 8 meter persegi sebagai *benchmark* bagi ukuran luas lantai per kapita dari suatu hunian. Hal ini sejalan dengan Kementerian Kesehatan, dimana salah satu syarat rumah dikatakan sehat adalah luas lantai rumah per kapitanya minimal 8 m². Gambar 5.3 memberikan informasi mengenai persentase rumah tangga miskin di Provinsi Lampung menurut luas lantai per kapita. Gambar tersebut menunjukkan bahwa terdapat 9,87 persen rumah tangga miskin yang menempati bangunan dengan luas lantai per kapita kurang dari atau sama dengan 8 meter persegi per kapita. Sebanyak 37,87 persen rumah tangga menempati hunian dengan kapasitas luas lantai per kapita antara 8 – 15 meter persegi. Adapun sebagian besar lainnya, yaitu sebanyak 52,26 persen rumah tangga miskin menempati hunian dengan luas lantai per kapita lebih dari 15 meter persegi. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar rumah tangga miskin tinggal di dalam hunian dengan kapasitas lantai yang cukup memadai.

5.4.2 Jenis Lantai

Selain permasalahan besaran luas lantai per kapita pada rumah tangga miskin, hal lain yang juga dilihat terkait kondisi perumahan yaitu jenis lantai yang digunakan. Hasil Susenas Maret 2018 menunjukkan bahwa 76,45 persen lantai yang digunakan pada rumah tangga miskin adalah semen; 10,38 persen masih berupa tanah dan ada 11,84 persen rumah tangga miskin yang menggunakan lantai marmer/granit, keramik atau

ubin/tegel/teraso sedangkan sisanya sebesar 1,33 persen menggunakan lantai jenis lainnya seperti kayu ataupun bambu.

Gambar 5.4 Persentase Rumah Tangga Miskin menurut Jenis Lantai Terluas di Provinsi Lampung, Tahun 2018

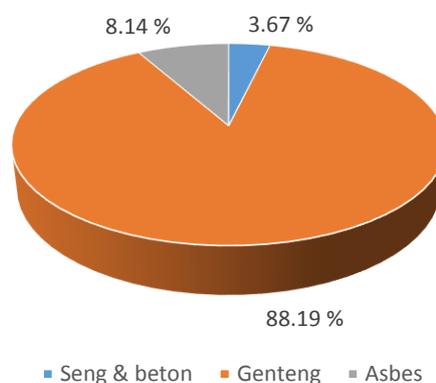


Sumber: Susenas Maret 2018, BPS Provinsi Lampung

5.4.3 Jenis Atap

Penggunaan jenis atap pada rumah tangga miskin maupun tidak miskin baik di perkotaan maupun perdesaan umumnya tidak terlalu jauh berbeda. Untuk jenis atap terluas yang banyak digunakan oleh rumah tangga miskin adalah genteng yaitu sebesar 88,19 persen. Rumah tangga yang menggunakan asbes sebesar 8,14 persen. Sedangkan sisanya sebanyak 3,67 persen masih menggunakan seng dan beton.

Gambar 5.5 Persentase Rumah Tangga Miskin menurut Jenis Atap Terluas di Provinsi Lampung, Tahun 2018

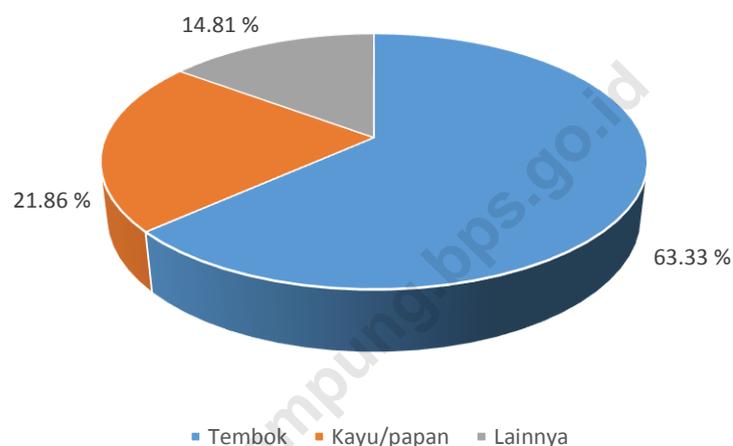


Sumber: Susenas Maret 2018, BPS Provinsi Lampung

5.4.4 Jenis Dinding

Sebagian besar rumah tangga miskin untuk jenis dinding terluas yang ada adalah tembok yaitu sebesar 63,33 persen. Sedangkan jumlah rumah tangga miskin yang menggunakan kayu/papan sebesar 21,86 persen. Dan yang menggunakan lainnya seperti bambu ataupun anyaman bambu sebanyak 14,81 persen.

Gambar 5.6 Persentase Rumah Tangga Miskin menurut Jenis Dinding Terluas di Provinsi Lampung, Tahun 2018

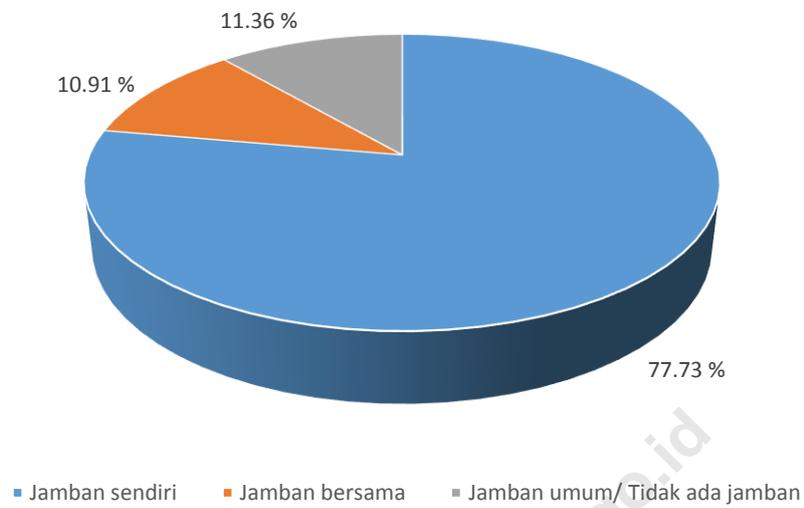


Sumber: Susenas Maret 2018, BPS Provinsi Lampung

5.4.5 Jenis Jamban

Selain itu, hasil Susenas 2018 juga menunjukkan adanya perbaikan kondisi rumah tangga miskin terkait dengan fasilitas sanitasi. Sebagian besar rumah tangga miskin atau sebanyak 77,73 persen telah memiliki fasilitas jamban sendiri. Rumah tangga miskin dengan fasilitas jamban bersama/komunal sebanyak 10,91 persen. Hanya masih ada sebagian kecil rumah tangga miskin atau sebanyak 11,36 persen yang menggunakan jamban umum/tidak mempunyai jamban.

Gambar 5.7 Persentase Rumah Tangga Miskin menurut Jenis Jamban yang Digunakan di Provinsi Lampung, Tahun 2018



Sumber: Susenas Maret 2018, BPS Provinsi Lampung

BAB VI

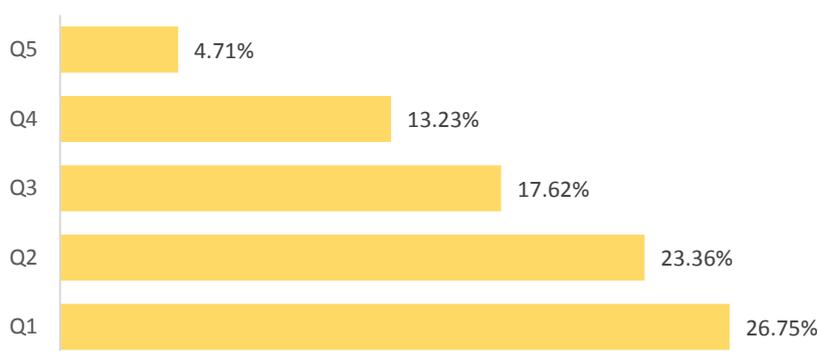
PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pemerintah telah banyak melakukan program-program pengentasan kemiskinan yang diupayakan mampu menyentuh hingga lapisan masyarakat terbawah. Meskipun demikian masih terdapat pula program-program yang juga diakses oleh rumah tangga tidak miskin.

6.1 Simpanan Keluarga Sejahtera

Simpanan Keluarga Sejahtera diberikan kepada keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang merupakan pengganti Kartu Perlindungan Sosial (KPS). Kartu Keluarga Sejahtera adalah penanda keluarga kurang mampu yang berhak untuk mendapatkan berbagai bantuan sosial termasuk simpanan keluarga sejahtera.

Gambar 6.1 Persentase Rumah Tangga yang Menerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/ Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) menurut Quintil Pengeluaran Perkapita/Bulan di Provinsi Lampung, 2018



Sumber: Susenas Maret 2018, BPS Provinsi Lampung

Berdasarkan distribusi rumah tangga penerima KPS/KKS, terlihat bahwa semakin tinggi kelompok quintil pengeluaran maka semakin rendah pula persentase rumah tangga penerima KPS/KKS (Gambar 6.1). Jika dilihat lebih jauh, rumah tangga pada kelompok 20

persen terbawah (Q_1) memiliki persentase yang paling tinggi sebagai penerima KPS/KKS yaitu sebesar 26,75 persen sedangkan pada rumah tangga kelompok 20 persen teratas (Q_5) terdapat 4,71 persen yang menerima KPS/KKS.

6.2 Program Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin)/Beras Sejahtera (Rastra)

Program Raskin/Rastra adalah salah satu program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial di bidang pangan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat berupa bantuan beras bersubsidi kepada rumah tangga berpendapatan rendah (rumah tangga miskin dan rentan miskin).

Tabel 6.1 menyajikan rumah tangga penerima raskin/rastra pada periode November 2017 sampai Februari 2018. Terlihat bahwa semakin tinggi pengeluaran semakin rendah persentase rumah tangga penerima raskin/rastra. Hal ini berarti penyebaran rumah tangga penerima raskin/rastra didominasi oleh kelompok pendapatan bawah (D_1 - D_5) dengan persentase tiap desilnya lebih dari 10 persen. Pola yang hampir sama terjadi baik di perkotaan maupun di perdesaan. Sementara itu, penerima raskin/rastra masih ditemukan pada beberapa rumah tangga di desil pengeluaran kelompok atas (D_9 - D_{10}) walaupun persentasenya kurang dari 10 persen.

Tabel 6.1 Persentase Rumah Tangga Penerima Beras Miskin (Raskin)/Beras Sejahtera (Rastra) Periode November 2017 Sampai dengan Februari 2018 Menurut Desil Pengeluaran dan Daerah di Provinsi Lampung

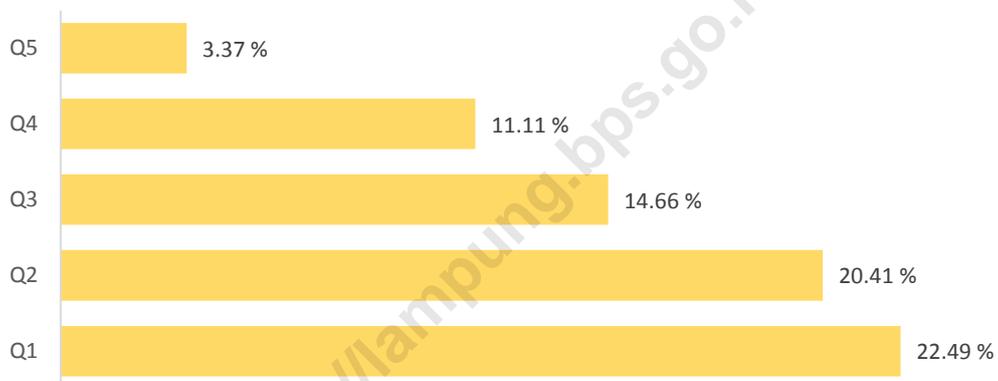
Desil Pengeluaran Perkapita/Bulan	Tipe daerah		
	Perkotaan	Perdesaan	Kota + Desa
D ₁	9.64	15.22	14.56
D ₂	17.64	12.62	13.21
D ₃	10.33	13.28	12.93
D ₄	16.50	10.85	11.52
D ₅	9.98	10.56	10.49
D ₆	12.90	9.59	9.98
D ₇	6.48	10.06	9.63
D ₈	7.19	8.35	8.21
D ₉	5.99	6.55	6.48
D ₁₀	3.34	2.94	2.98
Seluruh Rumah Tangga	100.00	100.00	100.00

Sumber: Susenas Maret 2018, BPS Provinsi Lampung

6.3 Program Indonesia Pintar

Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan penyempurnaan dari program Bantuan Siswa Miskin (BSM). Program Indonesia Pintar melalui pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP) adalah pemberian bantuan tunai pendidikan kepada seluruh anak usia sekolah (6-21 tahun) yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin atau anak yang telah memenuhi kriteria yang ditetapkan sebelumnya.

Gambar 6.2 Persentase Rumah Tangga yang Menerima Program Indonesia Pintar (PIP) menurut Quintil Pengeluaran Perkapita/Bulan di Provinsi Lampung, 2018



Sumber: Susenas Maret 2018, BPS Provinsi Lampung

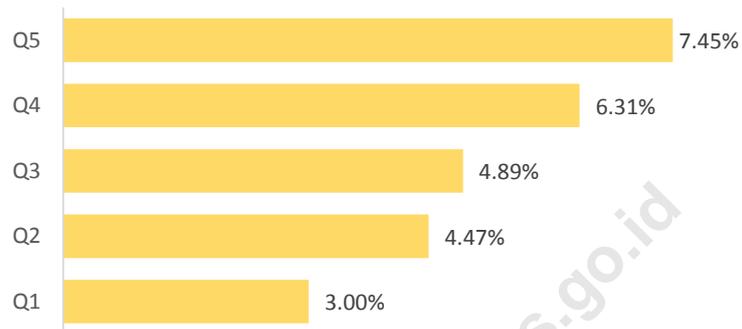
Gambar 6.2 menyajikan rumah tangga penerima PIP menurut quintil. Dari gambar tersebut, terlihat bahwa seluruh kelompok quintil penduduk menerima PIP. Pada quintil 1, sebesar 22,49 persen rumah tangga menerima PIP. Sementara itu, pada quintil 5, masih terdapat 3,37 persen rumah tangga menerima PIP.

6.4 Kredit Usaha Rakyat (KUR)

KUR berbeda dengan program penanggulangan kemiskinan yang lain. Sebagai program berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil, target penerima KUR adalah kelompok masyarakat hampir miskin yang kegiatan usahanya pada skala mikro dan kecil untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil. Oleh karena itu, wajar jika KUR hampir secara merata diterima pada semua kelompok quintil. Jika dilihat lebih lanjut, aksesibilitas program KUR pada quintil terendah jauh lebih

kecil dibandingkan penduduk pada quintil lain. Hal ini dimungkinkan karena persyaratan dan prosedur pengajuan KUR yang kurang begitu dipahami oleh masyarakat kalangan bawah.

Gambar 6.3 Persentase Rumah Tangga yang Menerima KUR menurut Quintil Pengeluaran Perkapita/Bulan di Provinsi Lampung, 2018



Sumber: Susenas Maret 2018, BPS Provinsi Lampung

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik (BPS). 2002. Dasar-Dasar Analisis Kemiskinan. Jakarta : Badan Pusat Statistik.
- . 2015. Pemanfaatan Data Susenas Kor dan KP (Pengolahan dan Meta Data Indikator/Tabel Statistik. Jakarta : Badan Pusat Statistik.
- . 2018. Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia. Jakarta : Badan Pusat Statistik.
- OECD. 2015. Survei Ekonomi OECD Indonesia Maret 2015, Ikhtisar. Jakarta: OECD.
- Satriawan, Bondan., Oktavianti, Henny., 2012. Upaya Pengentasan Kemiskinan Pada Petani Menggunakan Model Tindakan Kolektif Kelembagaan Pertanian, Jurnal Ekonomi Pembangunan Volume 13, Nomor 1, Juni 2012.
<http://journals.ums.ac.id/index.php/JEP/article/view/185>.
- Suryo, Mahatma Sindu, 2017. Analisa Kebutuhan Luas Minimal Pada Rumah Sederhana Tapak di Indonesia. Pusat Litbang Perumahan dan Permukiman, Bandung.
- Wibowo, Kodrat. 2015. Dampak Penghapusan Subsidi BBM di DKI Jakarta, Indonesia. Makalah Diskusi Final. Jakarta: Kementerian Keuangan Indonesia.
- World Bank. 2007. Era Baru Dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia, Ikhtisar. Jakarta: The World Bank Office.

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI LAMPUNG
BPS-Statistics of Lampung Province**

Jl. Basuki Rahmat No 54 Bandar Lampung
Telp: (62-721) 482909, Fax: (62-721) 484329
Homepage: <http://www.lampung.bps.go.id> Email: bps1800@bps.go.id

ISSN 978 602 7746 36 7

